

IKHTIAR JAKARTA: MEMBANGUN JAKARTA MENJADI KOTA LESTARI



**AMBITIOUS
CITY PROMISES**

Engaging citizens. Driving climate action.

Supported by:



Federal Ministry
for the Environment, Nature Conservation
and Nuclear Safety

Based on the decision of the German Bundestag



Jakarta
a city of collaboration



Sumber: ICLEI Indonesia

Sumber: ICLEI Indonesia



Sumber: ICLEI Indonesia



Sumber: ICLEI Indonesia



Sumber: ICLEI Indonesia

Acknowledgments

Dokumen ini disusun ICLEI – *Local Governments for Sustainability*, bekerja sama dan dengan kontribusi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pemangku kepentingan yang telah berpartisipasi dan memberikan masukan dalam konsultasi publik, lokakarya dan diskusi dengan dukungan dari Kementerian Federal Jerman untuk Lingkungan, Konservasi Alam, dan Keselamatan Nuklir (BMU)

Penyusun

Ms. Happy Tiara Asvita	ICLEI Indonesia Office Local Government Associate
Mr. Selamat Daroyni	ICLEI Indonesia Office Senior Officer
Ms. Pamela Cabacungan	ICLEI Southeast Asia Secretariat Senior Officer
Ms. Jiwon Lee	ICLEI World Secretariat Senior Officer
Mr. César Carreño	ICLEI World Secretariat Head of Climate Data
Mr. Tim Lazaroff	ICLEI World Secretariat Assistant
Ms. Nita Roshita	Konsultan ACP

Tanggal

18 Juni 2021

Foto Cover

Uray Zulfikar - Unsplash

Informasi Dokumen

Laporan ini berisi Ikhtiar Jakarta, sebuah dokumen yang menunjukkan strategi pembangunan rendah emisi yang dijanjikan oleh berbagai pemangku kepentingan lokal di Jakarta. Laporan ini mencerminkan masukan yang dikumpulkan dari serangkaian konsultasi dengan instansi terkait di DKI Jakarta, anggota *National Advisory Group* ICLEI Indonesia, dan perwakilan dari berbagai kelompok pemangku kepentingan di Jakarta. Dokumen ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) DKI Jakarta serta dokumen perencanaan dan kebijakan terkait mitigasi perubahan iklim lainnya oleh provinsi. Laporan ini disusun dengan pengawasan dari Kantor ICLEI Indonesia, Sekretariat Asia Tenggara, dan Sekretariat Dunia di bawah proyek: ***Ambitious City Promises Project***.

Informasi hak cipta

Dokumen ini adalah hak cipta dari ICLEI *Southeast Asia Secretariat* (SEAS). Hak cipta dilindungi undang-undang. Semua publikasi tidak boleh direproduksi, disimpan dalam sistem penyimpanan data, atau didistribusikan dalam bentuk apa pun, baik secara elektronik, mekanis, difotokopi, direkam, atau lainnya, tanpa izin tertulis sebelumnya dari pemilik hak cipta.

Supported by:

 Federal Ministry
 for the Environment, Nature Conservation
 and Nuclear Safety
 Based on the decision of the German Bundestag

Proyek ini didanai oleh Kementerian Federal Jerman untuk Lingkungan, Konservasi Alam, dan Keselamatan Nuklir (BMU). Pandangan yang diungkapkan dalam dokumen ini sama sekali tidak dianggap mencerminkan pendapat resmi BMU

Daftar Singkatan

3R	: <i>Reduce, Reuse, Recycle</i>
ACP	: <i>Ambitious City Promises</i>
AFOLU	: <i>Agriculture, Forestry and Other Land Use</i>
AKSARA	: Aplikasi Perencanaan dan Pemantauan Rendah Karbon
BAU	: <i>Business as usual</i>
BAPPEDA	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BAPPENAS	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BMU	: Kementerian Federal Jerman untuk Lingkungan, Konservasi Alam, dan Keselamatan Nuklir
BPBD	: Badan Penanggulangan Bencana Daerah
BRT	: <i>Bus Rapid Transit</i>
CDP	: <i>Carbon Disclosure Project</i>
CSR	: <i>Corporate Social Responsibility</i>
DAS	: Daerah Aliran Sungai
DBM	: Dinas Bina Marga
DLH	: Dinas Lingkungan Hidup
DCKTRP	: Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
Dinkes	: Dinas Kesehatan
Disdik	: Dinas Pendidikan
Dishub	: Dinas Perhubungan
Diskominfo	: Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik
Distamhut	: Dinas Pertamanan dan Hutan Kota
DKPKP	: Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
DPPAPP	: Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
DPRKP	: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

DRRM	: <i>Disaster Risk Reduction Management</i> (Pengurangan dan Manajemen Resiko Bencana)
DSDA	: Dinas Sumber Daya Air
DTKTE	: Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi
EPR	: <i>Electronic Road Pricing</i>
ERP	: <i>Extended Producer Responsibility</i>
IKI	: <i>International Climate Initiative</i>
ITF	: <i>Intermediate Treatment Facility</i>
GcoM	: <i>Global Covenant of Mayors for Climate & Energy</i>
GRK	: Gas Rumah Kaca
KLHK	: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
KRL	: Kereta Rel Listrik
LRT	: <i>Light Rail Train</i>
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
MRT	: <i>Mass Rapid Transit</i>
MRV	: <i>Monitoring, Reporting and Verification</i> (Pemantauan, Pelaporan dan Verifikasi)
NDC	: <i>Nationally Determined Contribution</i>
OMS	: Organisasi Masyarakat Sipil
PKK	: Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
RTH	: Ruang Terbuka Hijau
R&D	: <i>Research and Development</i> (Penelitian dan Pengembangan)
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJPD	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
SMG	: <i>Seoul Metropolitan Government</i>
SIGN SMART	: Sistem Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional, Sederhana Mudah, Akurat, Ringkas dan Transparan
SRN	: Sistem Registri Nasional
UNFCCC	: <i>United Nations Framework Convention on Climate Change</i>

Daftar Isi

Daftar Singkatan	4
Daftar Isi	6
Daftar Gambar	8
Daftar Tabel	9
Kata Pengantar Gubernur DKI Jakarta	10
Kata Pengantar <i>Country Manager ICLEI – Local Governments for Sustainability</i> Indonesia	12
Pendahuluan	14
Inspirasi: <i>Promise of Seoul</i>	17
Proses: Penyusunan Ikhtiar Jakarta	18
Struktur Kelembagaan	18
Peningkatan Kapasitas dan Pertukaran Pembelajaran <i>Peer-to-Peer</i>	19
Inventarisasi GRK tingkat kota	20
Konsultasi Pemangku Kepentingan	20
Identifikasi dan Prioritas Aksi Iklim	25
Hasil: Penyusunan Ikhtiar Jakarta	26
Tentang DKI Jakarta	26
Profil Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) DKI Jakarta	26
Target Penurunan Emisi GRK DKI Jakarta	27
Strategi dan Aksi Iklim Pada Sektor Spesifik	28
A. Energi dan Bangunan Hijau	30
B. Transportasi dan Kualitas Udara	41
C. Limbah Padat	52
D. Air	61
E. Ruang Terbuka Hijau dan Pertanian Perkotaan	70
F. Kesehatan dan Pengurangan dan Manajemen Risiko Bencana (DRRM) ...	80

Pembiayaan Ikhtiar Jakarta	88
Pengukuran, Pelaporan dan Verifikasi (MRV)	89
Lampiran	93

Daftar Gambar

Gambar 1. <i>Promise of Seoul</i> (2015)	17
Gambar 2. <i>Framework</i> Pelibatan Pemangku Kepentingan dalam implementasi ACP di DKI Jakarta dan Penyusunan Ikhtiar Jakarta	24
Gambar 3. Kategori pemangku kepentingan utama dalam Ikhtiar Jakarta	24
Gambar 4. <i>Timeline</i> proses penyusunan Ikhtiar Jakarta	26
Gambar 5. Strategi prioritas per sektor Ikhtiar Jakarta	29
Gambar 6. Komposisi sampah DKI Jakarta	53
Gambar 7. Skema pemantauan, pelaporan dan verifikasi (MRV) Ikhtiar Jakarta	91

Daftar Tabel

Tabel 1. Emisi gas rumah kaca (GRK) DKI Jakarta per sektor	27
Tabel 2. Target pengurangan emisi GRK DKI Jakarta berdasarkan Skenario BAU	28
Tabel 3. Potensi sumber pembiayaan implementasi Ikhtiar Jakarta	87
Tabel 4. Peran dan tanggung jawab berbagai pemangku kepentingan dalam implementasi Ikhtiar Jakarta	88
Tabel 5. SKPD pelaksana berdasarkan strategi prioritas Ikhtiar Jakarta	89

Kata Pengantar

Atas nama pribadi dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, izinkan saya mengapresiasi Yayasan ICLEI Indonesia yang telah berkolaborasi dalam gerakan aksi pengendalian krisis iklim di DKI Jakarta. Kolaborasi ini terkait dengan penyusunan Strategi Percepatan Pencapaian Target Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di DKI Jakarta melalui Program *Ambitious City Promises* (ACP). Salah satu keluaran dari program tersebut adalah tersusunnya dokumen Ikhtiar Jakarta: Membangun Jakarta menjadi Kota Lestari.

Krisis iklim telah mengubah tatanan dunia dan memicu bencana di berbagai penjuru bumi. Harus diakui bahwa krisis iklim ini terjadi tidak lepas dari perilaku dan tindakan pribadi-pribadi dari seluruh umat manusia yang mengabaikan keberlanjutan masa depan bumi. Untuk mengurangi ancaman bencana tersebut diperlukan tindakan luar biasa dan harus berkolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat

Jakarta telah memiliki komitmen sangat kuat untuk terlibat dalam gerakan memerangi krisis iklim global ini. Sejak tahun 2012, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki perhatian serius dalam menghadapi ancaman krisis iklim dengan berkomitmen untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 30% di tahun 2030. Komitmen tersebut merupakan bagian dari upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mendukung komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 29% dan 41% dengan bantuan luar negeri di Tahun 2030, sebagaimana tercantum dalam *Nationally Determined Contribution* (NDC). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengintegrasikan agenda global ini ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dengan mempertimbangkan dampak perubahan iklim yang akan semakin masif di masa mendatang, diperlukan tindakan akselerasi. Untuk itu, pada tahun 2021 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bertekad untuk menjadikan Jakarta sebagai Kota Berketahanan Iklim. Jakarta tidak hanya berfokus pada upaya penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang ambisius, tetapi juga meningkatkan ketahanan masyarakatnya terhadap iklim dan lingkungan yang kerap mengalami perubahan.

Dokumen Ikhtiar Jakarta yang berisi tentang komitmen, strategi dan aksi terpadu ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan kebijakan prioritas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengusung agenda mitigasi dan adaptasi bencana iklim. Serta dapat menjadi referensi dalam melakukan evaluasi dan monitoring seluruh pemangku kepentingan dalam memerangi perubahan iklim secara global.

Komitmen ini akan memperkuat ikatan kolaborasi kita bersama dalam menyelamatkan bumi dan Jakarta dari ancaman krisis iklim. Semoga kolaborasi ini dapat menjadi bagian penting dalam mencapai kesepakatan global *Paris Agreement* dan terbangunnya ketahanan bumi dari krisis iklim di masa mendatang.



Yang tidak kalah penting, semua ikhtiar ini merupakan bagian dari aksi konkret kita bersama dalam mewariskan lingkungan yang lebih baik bagi anak cucu dan generasi masa depan.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, 24 Mei 2021
Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,
Anies Baswedan, Ph.D.

Kata Pengantar

Dunia saat ini dihadapkan dengan pandemi COVID-19 yang memberikan pengaruh besar kepada perubahan pemahaman, cara berpikir dan perilaku manusia. Efek terhadap ekonomi masyarakat tentunya turut mendorong pertumbuhan ekonomi secara mikro, meso maupun makro sebuah negara. Pulihnya dunia dari COVID-19 dan akibat yang ditimbulkannya terhadap ekonomi, menurut para ahli membutuhkan waktu beberapa tahun ke depan. Intinya, pandemi ini secara cepat diterima sebagai ancaman nyata, sehingga reaksi atau respons yang diberikannya pun cepat pula.

Berbeda dengan pandemi COVID-19, ancaman dan dampak perubahan iklim sifatnya *slow onset event* (perlahan namun pasti dampaknya akan jauh lebih besar terhadap sistem biologi dan fisik alam di bumi ini). Saat ini terdapat pergeseran cara memandang yang melihat faktor penyebab dan akibat perubahan iklim tidak lagi semata persoalan lingkungan hidup, namun lebih terkait dengan pola strategi pembangunan yang dijalankan selama ini. Akibatnya berpengaruh pada stabilitas ekonomi makro negara, regional bahkan global. Untuk merespons ancaman tersebut, pendekatan strategi pembangunan harus melibatkan seluruh sektor strategis melalui strategi pembangunan yang mengadopsi pertimbangan perubahan iklim. Pada level di nasional, diskursus perubahan iklim ditempatkan ke dalam kebijakan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim.

Diperkirakan pada akhir abad ini, 50% dari penduduk akan bertempat tinggal di wilayah perkotaan, yang hanya menempati tiga persen dari keseluruhan tanah daratan. Pada abad sebelumnya, 80% pertumbuhan penduduk terjadi di kota dan perkotaan. Bagi negara berkembang kondisi ini akan semakin mengkhawatirkan, yang bakal menjadi tempat tinggal bagi delapan puluh persen jumlah keseluruhan penduduk dunia dalam waktu dua puluh lima tahun mendatang. Dari dua puluh kota besar, tujuh belas di antaranya berada di dunia berkembang pada akhir dekade ini. Oleh sebab itu, pemerintah kota di negara-negara tersebut berada di bawah tekanan yang luar biasa besar untuk menyediakan pelayanan dan infrastruktur dasar bagi penduduk.

Gambaran perkotaan di sebagian kota besar di negara berkembang, ditandai dengan pencemaran dan polusi udara yang sudah melebihi batas emisi dan standar kesehatan. Beberapa masalah lingkungan perkotaan, seperti pemanfaatan energi yang tidak efisien sampai kepada sumber energi yang tidak ramah lingkungan, kemudian persoalan akses untuk mendapatkan air minum yang bersih dan aman mengalami kemajuan seiring dengan pertumbuhan ekonomi, sementara hal lainnya cenderung memburuk. Diperkirakan pada tahun 2050, sekitar 70% dari 6,4 miliar populasi dunia akan hidup di perkotaan yang berpotensi melahirkan persoalan dan tantangan. Adanya ancaman perubahan iklim menjadikannya sebagai faktor yang turut memperparah kondisi yang ada, dan tentu semakin menempatkan perkotaan



sebagai kawasan yang sangat rentan dari akibat yang ditimbulkan oleh perubahan iklim.

Masyarakat dunia, tak terkecuali Indonesia menyadari bahwa ancaman perubahan iklim akibat pemanasan global telah menyebabkan kerugian yang begitu besar terhadap kehidupan sosial masyarakat, lingkungan fisik dan biologi serta ekonomi suatu negara. Itulah yang menjadi dasar pemikiran pemerintah Indonesia menjadi bagian dari perundingan dan negosiasi perubahan iklim di *The United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) setiap tahunnya. Dalam perkembangannya, perundingan di UNFCCC menghasilkan *Paris Agreement* atau Kesepakatan Paris yang diadopsi oleh 196 Pihak pada COP 21 di Paris pada 12 Desember 2015 dan mulai berlaku pada 4 November 2016. Tujuannya adalah untuk membatasi pemanasan global hingga di bawah 2, lebih disukai hingga 1,5 derajat Celcius, dibandingkan dengan tingkat pra-industri.

Sebagai tindak lanjut dari ratifikasi kesepakatan ini, Pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-undang No. 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to The United Nations Framework Convention on Climate Change*. Dalam perjalanan dan proses UNFCCC sampai saat ini, Kesepakatan Paris adalah yang pertama mengikat semua pihak (negara) untuk melakukan upaya ambisius untuk memerangi perubahan iklim dan beradaptasi dengan dampaknya.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sendiri saat ini telah mempersiapkan langkah strategi dan rencana kebijakan untuk membantu menuju pengurangan emisi sebesar 30% di tahun 2030 dan terciptanya *net zero emission* di tahun 2050, yang telah dicanangkan oleh Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan. Melalui inisiatif dan kerjasama dengan berbagai pihak, salah satunya dengan kolaborasi bersama Yayasan ICLEI - *Local Governments for Sustainability* Indonesia, melalui program *Ambitious City Promises* (ACP) sejak 2017 yang dituangkan ke dalam ragam kegiatan. Tema besar yang disampaikan adalah Ikhtiar Jakarta dalam mewujudkan provinsi, sekaligus kota besar (*Megacity*) sebagai kota yang berkelanjutan, salah satunya dengan mengajak peran serta masyarakat melalui kemampuan dan kapasitas yang dimilikinya untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan aksi iklim.

Dalam kesempatan ini juga, Yayasan ICLEI - *Local Governments for Sustainability* Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta dan jajarannya. Program dan kegiatan dapat berjalan berkat dukungan dan komitmen bersama. Diucapkan juga terima kasih kepada kelompok masyarakat, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi dan sektor swasta lainnya yang turut bekerja dan berkolaborasi dengan kami selama ini. Terakhir kepada tim ACP Indonesia, Selamat Daroyni, Happy Tiara Asvita dan tim pendukung lainnya di internal Yayasan ICLEI - *Local Governments for Sustainability* Indonesia, ICLEI Sekretariat Asia Tenggara dan ICLEI Kantor Global diucapkan terima kasih atas inisiatif dan kerjasamanya selama ini.

Ari Mochamad

Country Manager

Yayasan ICLEI - *Local Governments for Sustainability* Indonesia

Pendahuluan

Perubahan iklim berkembang pesat dan universal, menantang kota-kota di seluruh dunia untuk bangkit menghadapi tantangan dan menginspirasi rekan-rekan mereka. Berbagai upaya mitigasi dan adaptasi telah disiapkan untuk mengatasi isu perubahan iklim, namun implementasinya harus segera dimulai untuk memenuhi tujuan Kesepakatan Paris (*Paris Agreement*) yaitu menjaga kenaikan suhu global di bawah 1,5°C pada tahun 2030. Sebagai salah satu negara yang menandatangani Kesepakatan Paris (*Paris Agreement*), Pemerintah Indonesia telah menyampaikan *Nationally Determined Contribution* (NDC) pertamanya kepada Sekretariat *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) pada November 2016. Hal ini menegaskan komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 29% dengan upaya sendiri (tanpa syarat) dan sampai dengan 41% dengan bantuan internasional (bersyarat) di bawah skenario *business-as-usual* pada tahun 2030.

“Kota-kota harus menjadi pelopor gerakan untuk memerangi perubahan iklim di dunia, bila dilihat dampaknya, kondisi saat ini lebih tepat disebut Climate Crisis (Krisis Iklim). Untuk itu, gerakannya perlu diintegrasikan ke dalam perencanaan pembangunan masing-masing kota dan provinsi yang berkolaborasi dengan semua pihak sehingga masa depan bumi dapat diselamatkan dari krisis iklim ini,”

- Anies Baswedan, Gubernur Provinsi DKI Jakarta.

Sebagai ibu kota Indonesia, DKI Jakarta selalu berkomitmen untuk menjadi pemimpin di antara pemerintah daerah Indonesia dalam memajukan prioritas aksi iklim. Bahkan sebelum NDC diajukan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan target penurunan emisi GRK sebesar 30% (setara dengan 35,24 juta tCO₂e) pada tahun 2030, sesuai Peraturan Gubernur No. 131 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah untuk Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca DKI Jakarta (RAD-GRK). Pada tahun 2018, dilaporkan bahwa DKI Jakarta telah mencapai 26,5 % dari target pengurangan emisi pada tahun 2030 (setara dengan 7,95% dari total proyeksi emisi). Sebagian besar penurunan ini berasal dari aksi – aksi dalam meningkatkan efisiensi pembangkit listrik serta penggunaan bahan bakar nabati (biofuel) di sektor transportasi¹.

Dengan penyerahan dokumen NDC oleh pemerintah nasional dan seruan mendesak gubernur untuk bertindak, DKI Jakarta menegaskan kembali target pengurangan emisi GRK yang dijanjikan serta aspirasinya untuk mencapai netralitas emisi pada tahun 2050. Untuk memenuhi ini, pemerintah provinsi menyadari kebutuhannya untuk meningkatkan ambisinya dan mempercepat implementasi melalui upaya kolaboratif dengan semua pemangku kepentingan terkait. Oleh karena itu, DKI

Jakarta menyambut baik partisipasi dalam Proyek *Ambitious City Promises* (ACP)², yang dilaksanakan oleh ICLEI-*Local Government for Sustainability*, bekerja sama dengan Pemerintah Metropolitan Seoul (SMG) dan didanai oleh Kementerian Federal Jerman untuk Lingkungan, Konservasi Alam, dan Keamanan Nuklir (BMU) melalui program *International Climate Initiative* (IKI). Proyek internasional empat tahun ini bertujuan untuk memperluas bantuan teknis ke wilayah metropolitan utama di Indonesia, Filipina, dan Vietnam untuk merumuskan “Janji Kota” masing-masing, yang ditandai dengan pengurangan emisi GRK yang kuat dan rencana aksi iklim lokal yang diarahkan oleh target konkret, peningkatan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan (*multi-stakeholder*), dan strategi yang terintegrasi. Di Indonesia DKI Jakarta terpilih sebagai kota percontohan (kota model) sedangkan Kota Bekasi dan Tangerang terpilih sebagai kota satelit.

Terinspirasi oleh keberhasilan Pemerintah Metropolitan Seoul (SMG) dalam mencapai jalur pembangunan rendah emisinya sendiri melalui “Janji Seoul: Mengambil Tindakan Memerangi Perubahan Iklim” (*“Promise of Seoul: Taking Actions against Climate Change”*), DKI Jakarta telah bermitra dengan ICLEI dalam mengembangkan **“Ikhtiar Jakarta: Membangun Jakarta menjadi Kota Lestari**. Dokumen ini merupakan ringkasan aksi iklim yang disusun secara inklusif, partisipatif dan menjadi komitmen oleh berbagai pemangku kepentingan untuk mendukung upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam memenuhi target penurunan emisi GRK.

Ikhtiar Jakarta disusun berdasarkan kajian mendalam kebijakan dan rencana terkait serta kegiatan konsultasi multi-stakeholder. Lima dokumen perencanaan utama yang dikaji antara lain: (a) Peraturan Gubernur No. 131, 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan GRK (RAD-GRK) DKI Jakarta; (b) Inventarisasi Profil Emisi dan Pelaporan Target Penurunan Emisi GRK Provinsi DKI Jakarta (2019); (c) Rencana Pembangunan Jangka Menengah DKI Jakarta 2018-2022; (d) Rencana Strategis Masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun 2018-2022, dan (e) Strategi Jangka Panjang Menuju Pembangunan Rendah Karbon DKI Jakarta 2050. Gubernur Anies Baswedan menyampaikan potensi DKI Jakarta untuk meningkatkan ambisi iklimnya dalam acara *Zero Carbon City International Forum* pada 17 Maret 2021 yang diselenggarakan bersama oleh Kementerian Lingkungan Hidup Jepang, UNFCCC, ICLEI, dan *Institute for Global Environmental Strategies* (IGES). DKI Jakarta berkomitmen untuk meningkatkan upaya dalam mewujudkan potensi Jakarta untuk mencanangkan dan mencapai target nol emisi (*zero emission*) melalui upaya yang lebih agresif dan terpadu untuk mengakselerasi pelaksanaan aksi iklim nyata bersama para pemangku kepentingan. Dedikasi ini juga sejalan dengan komitmen DKI Jakarta sebagai anggota *Global Covenant of Mayors for Climate & Energy* (GCoM)³, aliansi global terbesar untuk kepemimpinan iklim kota dengan lebih dari 10.000 kota secara global berbagi visi jangka panjang untuk bekerja menuju masyarakat yang tangguh dan rendah emisi.

Serangkaian pertemuan konsultasi dan lokakarya dengan berbagai instansi pemerintah provinsi serta perwakilan dari berbagai pemangku kepentingan termasuk serikat perempuan, kelompok pemuda, kelompok agama, dunia usaha, akademisi, Organisasi Masyarakat Sipil (OMS)/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM),

¹ Laporan Inventarisasi GRK dan Penurunan Emisi GRK Provinsi DKI Jakarta. 2019

² <https://acp.iclei.org/>

³ <https://www.globalcovenantofmayors.org/>

antara lain juga diselenggarakan dalam penyusunan Dokumen Ikhtiar Jakarta. Konsultasi ini menjadi wadah bagi DKI Jakarta dan ICLEI untuk mengumpulkan janji aksi iklim guna mendukung upaya pemerintah dalam memenuhi target pengurangan GRK di tingkat provinsi dan nasional.

Ikhtiar Jakarta disusun untuk memperluas jangkauan keterlibatan pemangku kepentingan dalam RAD-GRK, yaitu dokumen perencanaan utama yang menguraikan strategi pengurangan emisi GRK DKI Jakarta. Selain itu, aksi yang dijanjikan di Ikhtiar Jakarta juga mengacu pada target pengurangan GRK dan peta jalan mitigasi yang ditunjukkan dalam Strategi Jangka Panjang untuk Mencapai Masyarakat Rendah Karbon DKI Jakarta 2050. Oleh karena itu, Ikhtiar Jakarta dapat menjadi acuan bagi semua pemangku kepentingan dalam mengidentifikasi tindakan nyata yang sejalan dengan strategi yang ada dan akan mendorong pelaksanaan aksi iklim di DKI Jakarta sehingga memungkinkan provinsi untuk memenuhi target penurunan emisi GRK sebesar 30% (skenario normal) dan 50% (skenario ambisius) pada tahun 2030 serta mencapai netralitas emisi pada tahun 2050. Selain itu, dokumen tersebut juga dapat digunakan sebagai referensi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lainnya seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Jangka Panjang Daerah (RPJMD dan RPJPD) serta sebagai Rencana Aksi Daerah Pengendalian Perubahan Iklim di DKI Jakarta.



Dokumen Ikhtiar Jakarta berisi strategi dan aksi iklim yang disusun secara inklusif, dan partisipatif serta menjadi komitmen berbagai pemangku kepentingan untuk mendukung upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam memenuhi target penurunan emisi GRK. Dokumen ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan kebijakan prioritas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengusung agenda mitigasi dan adaptasi bencana iklim

Inspirasi: *Promise of Seoul*

Selama Kongres Dunia ICLEI 2015 di Seoul, SMG mengumumkan strategi dan rencana aksi iklim yang ambisius dan komprehensif untuk mengurangi 20 juta ton emisi GRK pada tahun 2030. Aspek utama rencana tersebut adalah keterlibatan yang kuat dari para pemangku kepentingan. *The Promise of Seoul* memperluas pemerintahan partisipatif dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat, melibatkan 3,5 juta dari 10 juta penduduk Seoul dalam berbagai inisiatif. Masyarakat memainkan peran penting dalam menyusun rencana aksi dan membuat janji mereka sendiri untuk mengurangi emisi GRK. *The Promise of Seoul* adalah rencana terpadu dan strategi komprehensif yang mencakup 10 sektor perkotaan: **energi, transportasi, kualitas udara, sirkulasi sumber daya, air, ekologi, pertanian perkotaan, kesehatan, keselamatan, dan perencanaan kota**. Lebih penting lagi, rencana ini berorientasi aksi dengan visi yang kuat, area prioritas, dan rencana aksi spesifik di area kebijakan yang teridentifikasi untuk masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah kota. Sebagai sarana implementasi dan pemantauan, terdapat indikator kinerja yang konkret untuk mengukur kinerja setiap inisiatif.

Making Seoul a Sustainable, Climate-Environment City

Energy	Air Quality	Transport	Resource Recycle	Water
Low Carbon High Energy Efficiency	Clean and Safe Air To Breathe	Low Carbon by Green Transport	Resource Circulating City	Saving Water and Utilizing Rainwater
Ecology	Urban Agriculture	Health	Safety	Urban Planning
Rich and Harmonious Biodiversity	Urban farming in Everyday Life	Preventing Health Risks and Enhancing Adaptive Capacity	Building Capacity to Respond to and Prevent Climate Disasters	Building a City Resilient to Climate Change

Gambar 1. *Promise of Seoul* (2015)

The Promise of Seoul menandai tonggak penting dalam strategi iklim SMG. Meskipun emisi GRK nasional meningkat sekitar 30% (dengan *baseline* tahun 2018 dibandingkan dengan tingkat 2005), Seoul mengalami pengurangan emisi sebesar 5% dari tahun 2005-2018. Sektor rumah tangga menunjukkan pengurangan terbesar (11%) berkat keterlibatan pemangku kepentingan lokal yang ketat.

SMG bertujuan untuk mengurangi emisi kontributor terbesarnya (bangunan, transportasi dan limbah), sekaligus mempercepat transisi ke energi terbarukan dan menciptakan hutan. Sebagai langkah selanjutnya, pada Juli 2020 SMG mengumumkan 'Strategi Pengurangan GRK 2050 dengan Mempromosikan Kebijakan *Green New Deal*' dengan tujuan netralitas karbon yang lebih ambisius pada tahun 2050. Dalam kebijakan tersebut, Seoul berkomitmen pada netralitas iklim dan berupaya terutama untuk mengurangi emisi besar dari sektor swasta yang membutuhkan regulasi yang lebih kuat dan skema insentif yang lebih menarik. Kemudian, pada bulan Desember, Seoul mengeluarkan 'Rencana Pengurangan GRK 2050' untuk implementasi yang spesifik dan terperinci.

Proses: Penyusunan Ikhtiar Jakarta

Struktur Kelembagaan

Untuk memastikan keselarasan dengan kebijakan dan prioritas nasional, rujukan utama dalam penyusunan Ikhtiar Jakarta adalah dokumen NDC pertama dari pemerintah Indonesia, yang menyatakan niat negara untuk mengurangi emisinya dengan target tanpa syarat (*unconditional target*) sebesar 29% dan target bersyarat (*conditional target*) hingga 41% di bawah skenario *business-as-usual* pada tahun 2030. Selanjutnya, Ikhtiar Jakarta merujuk pada dokumen-dokumen berikut yang menetapkan arah strategis DKI Jakarta untuk aksi iklim dan pembangunan berkelanjutan: (a) Peraturan Gubernur No. 131, 2012 tentang Rencana Aksi Daerah untuk GRK DKI Jakarta Penurunan (RAD-GRK); (b) Inventarisasi Profil Emisi dan Pelaporan Target Penurunan Emisi GRK Provinsi DKI Jakarta (2019); (c) Rencana Pembangunan Jangka Menengah DKI Jakarta 2018-2022; (d) Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait 2018-2022, dan (e) Strategi Jangka Panjang Menuju Pembangunan Rendah Karbon DKI Jakarta 2050. Setelah menganalisis dokumen-dokumen ini dengan cermat, ICLEI Indonesia dan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta telah mengidentifikasi potensi titik masuk penting bagi Ikhtiar Jakarta untuk memberikan nilai tambah dalam strategi iklim DKI Jakarta secara keseluruhan.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) bekerja sama dengan Deputi Gubernur Bidang Tata Ruang dan Lingkungan sebagai lembaga utama dalam perumusan, pelaksanaan, dan pemantauan strategi iklim pemerintah provinsi juga telah melibatkan dan memobilisasi partisipasi SKPD berikut selama proses perumusan : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA); Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (DTKTE); Dinas Perhubungan (Dishub); Dinas Sumber Daya Air (DSDA); Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut); Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (DKPKP); Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD); Dinas Kesehatan (Dinkes); Dinas Pendidikan (Disdik); Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP); Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (DCKTRP); Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP); Dinas Bina Marga (DBM) dan Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik (Diskominfotik). Keterlibatan lintas SKPD ini telah memungkinkan pengumpulan data yang relevan dan tepat waktu, dan mengumpulkan masukan ahli melalui inisiatif yang ada serta rencana dan prioritas pembangunan provinsi.



Sumber: ICLEI Indonesia

Peningkatan Kapasitas dan Pertukaran Pembelajaran Peer-to-Peer



Sumber: ICLEI Indonesia

Pada tahap awal pelaksanaan proyek, ICLEI Indonesia melakukan survei penilaian kebutuhan (*need-based assessment*) untuk pemerintah daerah. Survei ini bertujuan untuk mengetahui kebutuhan kapasitas pemerintah daerah dalam merumuskan dan melaksanakan pembangunan rendah emisi secara efektif. Hasil survei menginformasikan peluang pengembangan kapasitas yang ditawarkan oleh proyek ACP sejak 2017. Peluang ini termasuk lokakarya pada sektor tertentu, pertukaran pembelajaran antara staf teknis DKI Jakarta dan SMG melalui pertemuan pakar tahunan (*annual expert meeting*), dialog dengan pemerintah nasional dan sektor swasta, serta *study tour*. Kantor ICLEI East Asia bersama *Seoul Human Resource Development Center* (SHRDC) mengadakan peningkatan kapasitas bagi pemerintah daerah yang terlibat dalam proyek ACP pada 2-8 September 2018 dan 1 - 8 September 2019. Lima staf teknis dari DKI Jakarta mengikuti *in-class training* dan kunjungan lapangan ke beberapa lokasi seperti Museum Nanjido, stasiun pengisian *hydroelectric*, *Seullo 7010*, *Seoul Upcycling Plaza*, dan desa mandiri energi yang dipimpin masyarakat.



Sumber: SHRDC

Kegiatan ini dilakukan untuk mempelajari secara langsung tentang kebijakan dan pengalaman yang diterapkan Seoul dalam menangani masalah lingkungan dan perubahan iklim termasuk limbah, transportasi, energi, dan partisipasi warga. Kemudian, ICLEI juga memberikan kesempatan kepada dua staf Pemprov DKI

Jakarta dari Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi untuk mengikuti kegiatan *study tour Urban-LEDs "Local Climate Action and Low Emissions Development in Europe"* ke tiga kota di Eropa, yaitu Helsinki (Finlandia), Bologna City (Italia), dan Warsawa (Polandia) pada 17-24 Juni 2019. Dengan mengunjungi tiga kota tersebut, peserta memiliki kesempatan untuk mengeksplorasi secara langsung berbagai solusi di berbagai sektor, termasuk pengolahan air limbah, distrik hijau, regenerasi kota, efisiensi energi dalam bangunan, solusi berbasis alam, distrik energi, langkah-langkah mobilitas berkelanjutan, dan banyak lagi.

Inventarisasi GRK tingkat kota

Berdasarkan Peraturan Presiden 71/2011, Pemerintah Indonesia mengamanatkan pemerintah daerah (kota, kabupaten, provinsi) untuk menyelenggarakan inventarisasi GRK dan melaporkan emisi GRK kepada pemerintah nasional melalui SIGN SMART⁴. Dikembangkan pada tahun 2015, SIGN SMART adalah sistem pengelolaan data GRK berbasis web yang memungkinkan pemerintah daerah memasukkan data aktivitas dan menghitung emisi GRK di sektor energi, limbah, proses industri dan penggunaan produk (IPPU), pertanian, dan kehutanan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) adalah lembaga utama yang bertanggung jawab atas pengumpulan, penjaminan dan pengendalian kualitas, dan pelaporan nasional input data dan estimasi GRK yang dihasilkan oleh SIGN SMART. Dalam proses pemutakhiran RAD-GRK, DKI Jakarta melakukan pemutakhiran inventarisasi GRK dengan tahun dasar 2010 sebagai tahun dasar. Provinsi ini juga melakukan inventarisasi lain dengan tahun 2018 sebagai tahun dasar untuk melacak lebih lanjut kinerja emisinya. Hasil inventarisasi tersebut dijadikan acuan untuk menginformasikan tingkat ambisi Ikhtiar Jakarta. Gambaran umum hasil inventarisasi emisi GRK DKI Jakarta dapat dilihat di bagian "Profil Emisi GRK DKI Jakarta".

Konsultasi Pemangku Kepentingan

Inti dari proses perumusan Ikhtiar Jakarta adalah proses konsultasi yang ekstensif dan partisipatif, yang dipimpin bersama oleh ICLEI Indonesia dan Dinas Lingkungan Hidup. Konsultasi ini melibatkan partisipasi dari instansi pemerintah terkait (lokal dan nasional) dan berbagai kelompok pemangku kepentingan. Berbagai pengetahuan dan ide antar kelompok pemangku kepentingan melalui proses perencanaan kolaboratif memberikan peluang bagi pemangku kepentingan untuk terlibat langsung dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan, sehingga menghasilkan aksi konkret yang dapat diimplementasikan untuk mengintensifkan upaya DKI Jakarta dalam mengatasi perubahan iklim.

Keterlibatan berbagai perwakilan dan kelompok masyarakat yang inklusif dan mendalam telah menghasilkan aksi iklim yang lebih beragam guna memberikan

Inti dari proses perumusan Ikhtiar Jakarta adalah proses konsultasi yang ekstensif dan partisipatif

⁴ <http://signsmart.menlhk.go.id/v2.1/app/>

manfaat yang lebih luas. Sementara data ilmiah memberikan dasar untuk mengidentifikasi sektor-sektor prioritas, keterlibatan dengan pemangku kepentingan memberikan peluang untuk menemukan pengetahuan asli dan lokal yang mengungkap kemungkinan solusi baru. Oleh karena itu, tindakan warga, terutama yang dimobilisasi oleh organisasi masyarakat sipil, memainkan peran yang tak tergantikan dalam pencapaian target pengurangan GRK.

Proses perumusan Ikhtiar Jakarta memposisikan berbagai pemangku kepentingan baik sebagai penggagas dan pelaksana janji provinsi untuk bertindak memerangi perubahan iklim. Strategi dan tindakan yang dituangkan dalam dokumen ini berasal langsung dari para pemangku kepentingan. Pendekatan ini menunjukkan bagaimana pemangku kepentingan yang berbeda dipandang sebagai mitra setara pemerintah yang berperan aktif dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan Ikhtiar Jakarta. Dengan demikian, para pemangku kepentingan juga semakin yakin dan merasa memiliki atas dokumen ini, menghasilkan komitmen dan akuntabilitas yang lebih kuat pada tahap implementasi selanjutnya. Identifikasi tindakan dan strategi menggunakan proses metodologi partisipatif guna memastikan bahwa kontribusi dari pemangku kepentingan publik dan swasta menjadi pertimbangan utama di dalam penyusunan dokumen Ikhtiar Jakarta. Juga telah dilakukan identifikasi bidang-bidang terkait dengan perubahan iklim dalam upaya membangun kerjasama dan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan agar dapat meningkatkan potensi pencapaian target.

Menempatkan pemangku kepentingan lokal sebagai aktor utama pada proses penyusunan Ikhtiar Jakarta memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk memberdayakan mereka dalam pencapaian target iklim. Sebanyak 11 konsultasi dan lokakarya validasi dilakukan yang diikuti lebih dari 470 peserta untuk meminta masukan dari berbagai kelompok pemangku kepentingan seperti warga, sektor swasta, organisasi nirlaba, koperasi, dan media. Secara khusus, para pemangku kepentingan ditanya tentang strategi dan program mereka yang dianggap berkontribusi dalam mengatasi dampak perubahan iklim dan mengurangi emisi GRK.

Guna memastikan keterwakilan berbagai pemangku kepentingan dalam setiap kegiatan konsultasi yang terdiri dari pemerintah dan kelompok masyarakat, terlebih dahulu dilakukan identifikasi melalui proses pemetaan pemangku kepentingan. Kelompok – kelompok pemangku kepentingan ini telah teridentifikasi memiliki pengaruh dan potensi dalam mendukung upaya penurunan emisi di DKI Jakarta. Kelompok masyarakat terdiri dari sembilan kelompok meliputi perempuan, pemuda dan anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, nelayan, dunia usaha dan industri, OMS/LSM, komunitas yang bergerak di bidang lingkungan, kelompok agama, dan akademisi. Setidaknya 30% dari total peserta dalam kegiatan ini adalah perempuan, memenuhi standar minimum perempuan dalam pemilihan parlemen sebagaimana diatur oleh undang-undang. Dari sembilan kelompok tersebut, tiga

Proses perumusan Ikhtiar Jakarta memposisikan berbagai pemangku kepentingan baik sebagai penggagas dan pelaksana janji provinsi untuk bertindak memerangi perubahan iklim

kelompok diidentifikasi memiliki potensi sumber daya dan pengaruh yang paling besar untuk secara aktif mendukung pelaksanaan aksi iklim di Ikhtiar Jakarta: *kelompok anak & pemuda, kelompok agama, dan kelompok bisnis dan industri*. Anak-anak dan pemuda memiliki potensi sebagai agen perubahan dan dapat mengadvokasi kelestarian lingkungan, sambil memberikan usulan bagi pemerintah daerah untuk mempertimbangkan pendekatan inovatif dalam memajukan target aksi iklim. Kelompok agama memiliki potensi pengorganisasian yang sangat besar; mereka memiliki nilai yang sama untuk melindungi dan melestarikan lingkungan, dan dapat memobilisasi konstituen mereka yang besar dan beragam. Kelompok bisnis dan industri berbagi nilai dalam bisnis inti mereka terkait dengan kelestarian lingkungan, seperti efisiensi energi, energi terbarukan, ekonomi sirkular, dan transportasi berkelanjutan. Mereka juga memiliki peran yang luar biasa dalam mengubah ide menjadi kenyataan dengan kapasitas mereka untuk memobilisasi sumber daya keuangan dan mengarahkan inovasi yang secara positif dapat mempengaruhi dinamika pasar dan pola konsumsi. Diskusi terfokus dengan kelompok-kelompok ini dilakukan untuk mengidentifikasi ide-ide tindakan nyata dan metode keterlibatan ketiga kelompok dalam mendukung pelaksanaan Ikhtiar Jakarta.

informatif. Konsultasi publik difasilitasi melalui kombinasi pleno dan diskusi kelompok terfokus (FGD). FGD memungkinkan setiap kelompok pemangku kepentingan untuk memiliki ruang terbuka dan bebas untuk mengekspresikan tantangan yang mereka alami dan rasakan. Pada gilirannya, diskusi ini menjadi cara untuk bersama-sama menciptakan ide dan solusi untuk mengatasi tantangan dan selanjutnya berkontribusi pada pengurangan emisi.



Melalui proses evaluasi yang menyeluruh, masyarakat menjadi pemimpin dalam menentukan aksi konkret dari setiap sektor perkotaan yang mereka anggap relevan dengan otoritas mereka sendiri sebagai perwakilan dari kelompok pemangku kepentingan mereka serta warga Jakarta. Sesi pleno juga memungkinkan setiap perwakilan kelompok pemangku kepentingan untuk mempresentasikan ide dan rekomendasi kolektif mereka untuk dimasukkan dalam Ikhtiar Jakarta. Ini juga menyediakan tempat bagi semua kelompok pemangku kepentingan untuk berinteraksi dan bertukar ide dan pemikiran lebih langsung untuk memperluas dan menyelesaikan perspektif yang saling bertentangan sehingga meminimalkan risiko potensi konsekuensi yang tidak diinginkan. Konsultasi ini difasilitasi oleh ICLEI dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memastikan tercapainya diskusi yang informatif dan rekomendasi yang membumi. Gambaran kerangka pelibatan pemangku kepentingan dalam perumusan Ikhtiar Jakarta dapat dilihat pada Gambar 2.



Meskipun diskusi lebih terfokus hanya dilakukan dengan ketiga kelompok tersebut karena pertimbangan potensi mereka yang kuat dalam menerjemahkan rencana menjadi aksi iklim, diskusi dengan semua pemangku kepentingan (melalui konsultasi publik dan lokakarya) juga telah dilakukan guna benar-benar memastikan keterwakilan yang bermakna dan dapat mengumpulkan wawasan yang beragam serta menghasilkan rencana yang komprehensif, membumi, dan





Gambar 2. *Framework* Pelibatan Pemangku Kepentingan dalam implementasi ACP di DKI Jakarta dan Penyusunan Ikhtiar Jakarta

Aksi iklim yang diidentifikasi dan dijanjikan dalam kegiatan konsultasi ini ditentukan dan dikategorikan untuk dilaksanakan oleh tiga kelompok pemangku kepentingan utama sebagaimana diuraikan dalam Gambar 3.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Nasional

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berperan sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan yang menentukan arah pembangunan DKI Jakarta menuju kota rendah karbon. Pemerintah pusat memiliki peran sebagai pembuat kebijakan nasional dan pelaksana kebijakan menuju pembangunan nasional rendah karbon.



Kelompok Masyarakat

Kelompok masyarakat meliputi akademisi, anak-anak dan remaja, perempuan, OMS/LSM, komunitas dan kelompok agama. Masyarakat berperan sebagai penggagas dan pelaksana aksi iklim juga menjadi penentu keberlangsungan kondisi lingkungan di DKI Jakarta ke depan.

Pelaku Usaha dan Industri

Kelompok usaha dan industri memiliki peran yang menentukan dalam kebijakan pasar yang lebih ramah lingkungan dan juga bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan di DKI Jakarta, khususnya pada sektor energi terbarukan, transportasi, limbah, air, dll.

Gambar 3. Kategori pemangku kepentingan utama dalam Ikhtiar Jakarta

Identifikasi dan Prioritas Aksi Iklim

Kegiatan konsultasi dan diskusi yang saling memperkuat sebagaimana dibahas sebelumnya, telah menghasilkan sektor prioritas Ikhtiar Jakarta sebagai berikut: **energi & bangunan hijau, transportasi & kualitas udara, pengelolaan limbah padat.** Sektor lain yang mendapat perhatian cukup besar adalah **air, ruang terbuka hijau & pertanian perkotaan, dan kesehatan & pengurangan dan manajemen risiko bencana (DRRM)** Prioritas aksi iklim di setiap sektor perkotaan yang akan dilaksanakan oleh tiga kategori kelompok pemangku kepentingan utama juga ditentukan oleh para pemangku kepentingan melalui diskusi yang menggunakan analisis multi-kriteria. Definisi dan prioritas aksi iklim Ikhtiar Jakarta juga menganut karakteristik umum dari Janji Kota (*City Promise*): **target pengurangan GRK yang ambisius, inklusif, terintegrasi & lintas sektoral, dapat dilaksanakan untuk semua pemangku kepentingan, terukur & dapat diverifikasi.**



Gambar 4. *Timeline* proses penyusunan Ikhtiar Jakarta

Karakteristik umum dari Janji Kota (*City Promise*): target pengurangan GRK yang ambisius, inklusif, terintegrasi & lintas sektoral, dapat dilaksanakan untuk semua pemangku kepentingan, terukur & dapat diverifikasi.

Hasil: Penyusunan Ikhtiar Jakarta

Tentang DKI Jakarta

Jakarta adalah ibu kota Indonesia dan juga merupakan jantung dari *megacity* terbesar kedua di dunia - Wilayah Metropolitan Jakarta (secara lokal dikenal sebagai Jabodetabek). Dengan jumlah penduduk sekitar 10 juta jiwa, Jakarta merupakan kota terpadat di Indonesia dan kota terbesar di Asia Tenggara⁵. Jakarta juga merupakan pusat ekonomi, politik, budaya, perdagangan, bisnis, dan keuangan negara. Kegiatan ekonomi Jakarta sangat bergantung pada kegiatan perdagangan, keuangan, dan konstruksi⁶.

Terletak di wilayah pesisir yang dilalui oleh 13 sungai, Jakarta merupakan wilayah yang rawan terkena bencana terkait iklim seperti banjir pesisir dan kenaikan permukaan laut. Wilayah utara Jakarta sangat berisiko terjadinya banjir karena wilayah tersebut semakin tenggelam akibat penurunan tanah. Peristiwa banjir besar terjadi di seluruh Jakarta karena meningkatnya frekuensi dan intensitas curah hujan tinggi. Peristiwa ini menyebabkan penduduk DKI Jakarta harus mengungsi ke tempat yang lebih aman serta terjadinya kerusakan harta benda dan hilangnya nyawa.

Seperti kota-kota besar lainnya secara global, Jakarta mengalami urbanisasi yang cepat dan diperkirakan akan terus demikian di masa mendatang. Tren urbanisasi ini juga meningkatkan pengaruh Jakarta di Indonesia dan di Asia Tenggara pada umumnya. Dengan demikian, permintaan akan layanan infrastruktur yang lebih banyak dan lebih baik seperti listrik dan transportasi juga meningkat. Hal ini juga mengakibatkan terjadinya perubahan pola konsumsi warga dengan peningkatan konsumsi energi dan timbulan limbah yang berkontribusi pada peningkatan emisi GRK.

Profil Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) DKI Jakarta

Inventarisasi GRK pertama DKI Jakarta dengan tahun dasar 2005 menunjukkan bahwa provinsi tersebut memiliki tingkat emisi sebesar 34,03 juta tCO₂e. Dengan menggunakan emisi *baseline* ini, diproyeksikan bahwa DKI Jakarta dapat menghasilkan sebanyak 117 juta tCO₂e pada tahun 2030 di bawah skenario *business-as-usual* (BAU), hampir tiga kali lebih tinggi dari emisi *baseline* 2005. Proyeksi emisi ini menjadi dasar provinsi dalam menetapkan komitmennya untuk mengurangi emisi GRK yang sebesar 30% pada tahun 2030.

Pada tahun 2019, DKI Jakarta memulai proses pemutakhiran RAD-GRK yang ada dengan memperbarui inventarisasi GRK menggunakan tahun dasar 2010 dan

⁵ Jakarta Population 2021. Sumber: [link](#).

⁶ BPS, Statistik Provinsi DKI Jakarta. 2021. DKI Jakarta Dalam Angka. Sumber: [link](#)

menghitung ulang proyeksi emisinya hingga 2030. Berdasarkan inventarisasi ini, ditentukan bahwa provinsi tersebut mengeluarkan emisi sekitar 38 juta tCO₂e pada tahun 2010. Sektor energi menyumbang lebih dari setengah total emisi (74%); emisi yang tersisa berasal dari sektor pembangkit listrik (21%) dan limbah (4,65%). Berdasarkan emisi baseline 2010, diproyeksikan DKI Jakarta dapat menghasilkan hingga 106 juta tCO₂e pada tahun 2030 dan 189 juta tCO₂e pada tahun 2050 dengan skenario BAU.

Tabel 1. Emisi gas rumah kaca (GRK) DKI Jakarta per sektor⁷

Sektor	Emisi GRK baseline 2010 (ribu tCO ₂ e)	Proyeksi Emisi GRK pada Skenario BAU (ribu tCO ₂ e)	
		Emisi GRK 2030	Emisi GRK 2050
Energi (energi stasioner, transportasi, konsumsi energi)	28.243	83.327	165.274
Industri energi (Pembangkit listrik)	7.985	19.029	19.029
Limbah (limbah padat dan cair)	1.770	4.233	5.241
AFOLU	31	59,80	-
TOTAL	38.029	106.559	189.544

DKI Jakarta juga memperkirakan emisi GRKnya menggunakan tahun 2018 sebagai tahun dasar. Dalam inventarisasi ini, provinsi ini menghasilkan emisi sebesar 29 juta tCO₂e, lebih rendah dari emisi sebelumnya pada tahun 2005 dan 2010. Namun, dengan memasukkan pendekatan inventarisasi berbasis konsumsi (*indirect emission*), ditentukan bahwa provinsi tersebut menghasilkan 57,55 juta tCO₂e. Hampir setengah dari emisi ini berasal dari konsumsi listrik (49%), sedangkan emisi sisanya berasal dari penggunaan bahan bakar stasioner (33%), pembangkit listrik (14%), dan sektor limbah (4%).

Target Penurunan Emisi GRK DKI Jakarta

Dengan menggunakan perhitungan ulang emisi GRK menggunakan tahun 2010 sebagai tahun dasar, DKI Jakarta juga telah meninjau kembali target penurunan emisi GRKnya. DKI Jakarta bertujuan untuk mencapai **penurunan 30% dari emisi GRK yang diproyeksikan di bawah skenario BAU pada tahun 2030**. Aksi mitigasi di sektor energi (68,18%), pembangkit listrik (28,45%), dan limbah (4,43%) adalah aksi paling mungkin dilakukan untuk mencapai target ini. Aksi mitigasi ini akan dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dengan dukungan tambahan dari kementerian nasional terkait dan pemangku kepentingan eksternal.

⁷ Draft RAD-GRK versi Mei. 2021

Tabel 2. Target pengurangan emisi GRK DKI Jakarta berdasarkan Skenario BAU⁸

Sektor	Emisi GRK baseline 2010 (ribu tCO ₂ e)	Proyeksi Emisi GRK 2030 pada skenario BAU (ribu tCO ₂ e)	Proyeksi penurunan emisi GRK terhadap skenario BAU tahun 2030 (ribu tCO ₂ e)	
			Skenario penurunan emisi 30%	Skenario penurunan emisi 50%
Energi (energi stasioner, transportasi, konsumsi energi)	28.243	83.237	21.689	40.453
Industri energi (Pembangkit listrik)	7.985	19.029	9.185	9.248
Limbah (limbah padat dan cair)	1.770	4.233	1.429	2.057
AFOLU	30,92	59,8	19,30	27,43
TOTAL	38.029	106.559	32.322	51.786

Mengingat dampak nyata dari perubahan iklim dan meningkatnya frekuensi bencana iklim secara global, diperlukan tindakan yang lebih ambisius. Pada tahun 2021, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengumumkan untuk menjadikan **Jakarta sebagai Kota Berketahanan Iklim**, dimana Jakarta akan melakukan upaya optimal untuk menurunkan emisi GRK serta meningkatkan kapasitas adaptasi masyarakat dalam menghadapi dampak perubahan iklim. Provinsi ini bertekad **untuk mengurangi 50% emisi GRK pada tahun 2030 (dibandingkan dengan tingkat emisi yang diperkirakan berdasarkan skenario BAU) dan mencapai netralitas emisi (net-zero emission) pada tahun 2050**. Untuk mencapai hal ini, aksi iklim harus difokuskan pada sektor energi dengan meningkatkan pergeseran dari diesel dan bensin menjadi biofuel, gas alam dan listrik. Di sektor limbah, pembangkit listrik limbah menjadi energi juga akan beroperasi untuk menambah kebutuhan daya dan mengurangi emisi metana dari TPA. Untuk sektor pertanian, kehutanan, dan tata guna lahan (AFOLU), daerah penyerapan tambahan harus ditetapkan untuk mengimbangi emisi karbon.

Strategi dan Aksi Iklim Pada Sektor Spesifik

Untuk segera memenuhi target penurunan GRK yang ditetapkan oleh DKI Jakarta dengan tetap menjaga konsistensi dengan kondisi lokal, langkah-langkah yang ada, serta janji dan aspirasi pemangku kepentingan yang berbeda, Ikhtiar Jakarta menghadirkan strategi pembangunan rendah emisi yang saling melengkapi dan memperkuat strategi yang ada. Dokumen ini merinci aksi dan komitmen di sektor-sektor berikut: **energi dan bangunan hijau, transportasi & kualitas udara, pengelolaan limbah padat, air, ruang terbuka hijau & pertanian perkotaan, dan kesehatan & pengurangan dan manajemen risiko bencana (DRRM)** yang

⁸ Draft RAD-GRK versi Mei. 2021

akan dilakukan oleh **pemerintah (nasional dan provinsi), kelompok masyarakat, dan badan usaha**. Aksi dan komitmen ini didasarkan pada RAD-GRK berdasarkan tinjauan dan konsultasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan ICLEI Indonesia. Aksi dan komitmen ini berasal dari identifikasi dan prioritas strategi dan aksi iklim oleh berbagai pemangku kepentingan sendiri selama kegiatan konsultasi dalam proses perumusan Ikhtiar Jakarta. Aksi dan tindakan ini ditentukan oleh para pemangku kepentingan berdasarkan kapasitas, pengaruh, dan potensi yang mereka rasakan sebagai perwakilan dari kelompok pemangku kepentingan mereka dan sebagai warga Jakarta. Dengan demikian, hal ini akan meningkatkan kepemilikan dan tanggung jawab para pemangku kepentingan terhadap Ikhtiar Jakarta dan implementasinya.



Gambar 5. Strategi prioritas per sektor Ikhtiar Jakarta

Strategi dan aksi prioritas ditentukan oleh perwakilan kelompok pemangku kepentingan dengan menggunakan CLIMACT PRIO sebagai alat. Prioritas dilakukan berdasarkan delapan kriteria berikut: **potensi penurunan emisi GRK, potensi pengurangan polusi udara, biaya, penerimaan sosial, penciptaan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan (kenyamanan, keselamatan, keamanan), memastikan inklusi sosial, dan ketersediaan fasilitas publik**.

Subbagian berikut memberikan gambaran umum tentang aksi prioritas yang diidentifikasi per kelompok pemangku kepentingan termasuk informasi berdasarkan relevansi, strategi, tujuan, dan target.

Energi dan Bangunan Hijau

Aksi-Aksi Utama

- a. **Monitoring energi dan apresiasi terhadap upaya penghematan energi**
- b. **Edukasi tentang perilaku hemat energi**
- c. **Bantuan pendanaan untuk penggunaan energi terbarukan**
- d. **Kampanye energi bersih**
- e. **Mempromosikan penggunaan peralatan dan perangkat hemat energi**
- f. **Implementasi kebijakan bangunan hijau**
- g. **Pengembangan perangkat dan mesin sederhana bertenaga surya untuk penggunaan sehari - hari**
- h. **Peningkatan kapasitas praktisi energi terbarukan**
- i. **Investasi energi terbarukan**

A. Energi dan Bangunan Hijau

Menurut inventarisasi GRK DKI Jakarta 2010, sektor energi menyumbang 95,3% dari total perkiraan emisi provinsi. Ini termasuk emisi yang dihasilkan dari konsumsi bahan bakar stasioner dari sektor rumah tangga, komersial dan institusi, dan industri serta emisi yang dihasilkan oleh pembangkit listrik, konsumsi bahan bakar di sektor transportasi dan konsumsi listrik. Sementara itu, inventarisasi GRK terbaru dengan tahun dasar 2018 yang juga mencakup penghitungan emisi tidak langsung (*indirect emission*) menunjukkan bahwa sektor energi menyumbang 96% dari keseluruhan emisi provinsi. Hampir setengah dari emisi energi disebabkan oleh konsumsi listrik (49%), diikuti oleh konsumsi bahan bakar stasioner dan transportasi (33%), pembangkit listrik (14%), dan limbah (4%). Patut dicatat bahwa dua pembangkit listrik di wilayah administrasi DKI Jakarta ini dikelola oleh PLN, sebuah perusahaan listrik milik negara.

Untuk mencapai target mitigasinya, **DKI Jakarta harus mengurangi emisi GRK di sektor energi dan pembangkit listrik hingga 30.874.000 tCO₂e pada tahun 2030 dan 52.682.000 tCO₂e pada tahun 2050**. Hal ini akan memerlukan aksi - aksi terkait peningkatan efisiensi energi, sertifikasi bangunan hijau, pemanfaatan energi bersih (misalnya beralih dari bensin dan solar menjadi biofuel), retrofit LED, dan pemasangan sistem fotovoltaik surya atap (*solar PV*)⁹. Peta jalan mitigasi untuk pemerintah provinsi telah diuraikan dalam RAD GRK dan Strategi Jangka Panjang Menuju Pembangunan Rendah Karbon DKI Jakarta 2050. Berikut adalah aksi iklim yang dijanjikan oleh berbagai pemangku kepentingan untuk mendukung DKI Jakarta dalam mencapai target tersebut.

Strategi :	Mendorong efisiensi energi, konservasi energi, dan energi terbarukan
Tujuan :	Untuk berkontribusi pada pengurangan emisi GRK dalam sektor energi dan pembangkit listrik hingga 30.874.000 tCO₂e pada tahun 2030 melalui langkah-langkah yang mempromosikan energi efisiensi konservasi dan adopsi energi terbarukan.

⁹ Studi Pendahuluan: Strategi Jangka Panjang Menuju Pembangunan Rendah Karbon DKI Jakarta 2050. 2020

Aksi Utama

Monitoring energi dan apresiasi terhadap upaya penghematan energi

Indikator

- Setidaknya 30% sekolah mengurangi konsumsi listrik tahunan mereka hingga 20% pada tahun 2030
- Setidaknya 30% bangunan komersial eksisting telah mengurangi konsumsi listrik tahunan hingga 30% pada tahun 2030
- Setidaknya 50% penduduk DKI Jakarta mempraktikkan *Langkah-Langkah* penghematan energi

Aksi yang Dijanjikan (*Pledged Actions*)

Pemerintah Daerah	Kelompok Bisnis dan Pelaku Usaha	Kelompok Masyarakat
<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan monitoring penggunaan energi dan memberikan apresiasi kepada kelompok masyarakat dan badan usaha dengan praktik penghematan energi terbaik • Meninjau kebijakan mengenai energi secara berkala dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip partisipatif, inklusivitas, dan kesetaraan gender • Membangun gedung baru dan/atau merenovasi gedung pemerintah eksisting dengan memenuhi standar bangunan hijau 	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan kerjasama dan transparansi dengan pemerintah dalam pelaksanaan program monitoring penggunaan energi dengan memberikan akses yang lebih baik kepada pemerintah untuk audit energi perkantoran, bisnis dan bangunan komersial. • Secara teratur menyerahkan laporan kepada instansi pemerintah terkait tentang kegiatan efisiensi energi dan bangunan hijau yang dilakukan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan peralatan hemat energi • Pengelola gedung sekolah, tempat ibadah, dan fasilitas lainnya mengembangkan materi komunikasi, informasi dan edukasi yang efektif untuk menginformasikan dan mendorong anggota masyarakat mereka agar mempraktikkan langkah-langkah penghematan energi • Memantau konsumsi energi dan keefektifan tindakan penghematan energi yang dipraktikkan dan membagikan praktik terbaik (<i>best-practice</i>) yang telah terbukti kepada anggota masyarakat



Sumber: Bayu Syaits - Unsplash

Aksi Utama

Edukasi tentang perilaku hemat energi

Indikator

- Setidaknya 30% sekolah mengurangi konsumsi listrik tahunan mereka hingga 20% pada tahun 2030
- Setidaknya 30% bangunan komersial eksisting telah mengurangi konsumsi listrik tahunan hingga 30% pada tahun 2030
- Setidaknya 50% penduduk DKI Jakarta mempraktikkan *Langkah-Langkah* penghematan energi

Aksi yang Dijanjikan (*Pledged Actions*)

Pemerintah Daerah	Kelompok Bisnis dan Pelaku Usaha	Kelompok Masyarakat
<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan materi komunikasi, informasi dan edukasi bekerjasama dengan akademisi dan/atau OMS • Menyelenggarakan kampanye dan lokakarya tentang langkah-langkah penghematan energi untuk ruang publik, gedung, dan sekolah • Menyelenggarakan kompetisi hemat energi antar instansi pemerintah dan sekolah bekerjasama dengan OMS dan swasta 	<ul style="list-style-type: none"> • Menyelenggarakan kampanye dan lokakarya tentang langkah-langkah penghematan energi di perusahaan • Berpartisipasi aktif dalam kampanye penghematan energi seperti mengeluarkan kebijakan internal untuk mematikan lampu saat istirahat makan siang dan kampanye yang diselenggarakan oleh pemerintah • Menawarkan keahlian kepada pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan kompetisi hemat energi 	<ul style="list-style-type: none"> • Berpartisipasi aktif, mempromosikan, dan mengadopsi pembelajaran tentang penghematan energi yang diselenggarakan oleh pemerintah • Berpartisipasi aktif dalam kompetisi hemat energi yang diselenggarakan oleh pemerintah • Ikut serta dalam menyelenggarakan kampanye <i>Earth Hour / We Love Jakarta</i> (terinspirasi oleh <i>One Planet City Challenge</i> WWF) di komunitas mereka sendiri.



Sumber: Riccardo Annandale - Unsplash

Aksi Utama		
Bantuan pendanaan untuk penggunaan energi terbarukan		
Indikator		
<ul style="list-style-type: none"> • Setidaknya 1.000 panel surya atap telah dipasang di perumahan, komersial, bangunan industri melalui bantuan pendanaan dari pemerintah provinsi 		
Aksi yang Dijanjikan (<i>Pledged Actions</i>)		
Pemerintah Daerah	Kelompok Bisnis dan Pelaku Usaha	Kelompok Masyarakat
<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun studi alternatif pembiayaan termasuk modalitas insentif fiskal dan non-fiskal untuk instalasi energi terbarukan • Memberikan apresiasi dan insentif kepada perusahaan dan penduduk yang memasang instalasi sistem fotovoltaik surya atap di properti mereka sendiri • Memasang sistem fotovoltaik surya atap di semua gedung dan fasilitas pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> • Memasang sistem fotovoltaik surya atap di properti perusahaan • Meningkatkan kapasitas produksi surya atap • Memanfaatkan dana bantuan untuk penggunaan energi terbarukan yang tersedia oleh pemerintah provinsi untuk memasang sistem fotovoltaik surya atap di gedung dan fasilitas perusahaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Berpartisipasi aktif dalam konsultasi dan advokasi terkait mekanisme pendanaan dan pembiayaan untuk implementasi energi terbarukan • Memasang sistem fotovoltaik surya atap di rumah, sekolah, dan tempat ibadah, jika memungkinkan.



Aksi Utama		
Kampanye energi bersih		
Indikator		
<ul style="list-style-type: none"> • Setidaknya 10% industri yang beroperasi di DKI Jakarta telah beralih dari solar/bensin ke biofuel 		
Aksi yang Dijanjikan (<i>Pledged Actions</i>)		
Pemerintah Daerah	Kelompok Bisnis dan Pelaku Usaha	Kelompok Masyarakat
<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun materi kampanye bekerjasama dengan akademisi dan/atau OMS • Menyelenggarakan kampanye tentang pemanfaatan energi bersih untuk gedung-gedung pemerintah, sekolah, tempat ibadah, gedung komersial, pasar, dll. • Melaksanakan proyek percontohan pemanfaatan energi bersih di fasilitas umum dan kantor-kantor pemerintah seperti sistem fotovoltaik surya atap, sampah menjadi energi dan melakukan peningkatan skala jika proyek percontohan tersebut memiliki potensi direplikasi dan memberi manfaat yang signifikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Berpartisipasi aktif dalam kampanye pemanfaatan energi bersih • Beralih ke bahan bakar alternatif bersih dalam kegiatan operasional (misalnya energi stasioner, bahan bakar kendaraan) 	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun dan menyebarluaskan materi informasi, edukasi dan komunikasi berbasis daring (<i>online</i>) dan luring (<i>offline</i>) tentang pemanfaatan energi bersih • Beralih ke bahan bakar alternatif bersih dalam operasinya (misalnya energi stasioner, bahan bakar kendaraan)



Aksi Utama

Mempromosikan penggunaan peralatan dan perangkat hemat energi

Indikator

- 100% bangunan dan fasilitas umum menggunakan peralatan dan perangkat hemat energi
- Setidaknya 30% bangunan dan fasilitas komersial menggunakan peralatan dan perangkat hemat energi

Aksi yang Dijanjikan (*Pledged Actions*)

Pemerintah Daerah	Kelompok Bisnis dan Pelaku Usaha	Kelompok Masyarakat
<ul style="list-style-type: none"> • Mengeluarkan kebijakan untuk mempromosikan penggunaan peralatan dan perangkat hemat energi di gedung-gedung pemerintah, sekolah, dan ruang publik • Mengadakan dan menggunakan peralatan dan perangkat hemat energi di semua gedung pemerintah • Menyelenggarakan kampanye untuk mempromosikan penggunaan peralatan dan perangkat hemat energi 	<ul style="list-style-type: none"> • Beralih ke peralatan dan perangkat hemat energi (misalnya sistem pendingin dan penerangan) dalam kegiatan operasional bisnis, kantor, dan bangunan komersial 	<ul style="list-style-type: none"> • Beralih ke peralatan dan perangkat elektronik hemat energi (misalnya sistem pendingin dan penerangan) di sekolah, tempat ibadah, dan rumah tangga. • Berpartisipasi aktif dalam advokasi kampanye untuk mempromosikan penggunaan peralatan dan perangkat hemat energi serta mendorong anggota untuk melakukannya



Sumber: Muhammad Rizki - Unsplash

Aksi Utama

Implementasi kebijakan bangunan hijau

Indikator

- Setidaknya 60% dari bangunan publik dan swasta yang eksisting memenuhi standar bangunan hijau sesuai Peraturan Gubernur No. 38 Tahun 2012
- Semua bangunan dan fasilitas umum baru telah memenuhi standar bangunan hijau sesuai Peraturan Gubernur No. 38 Tahun 2012

Aksi yang Dijanjikan (*Pledged Actions*)

Pemerintah Daerah	Kelompok Bisnis dan Pelaku Usaha	Kelompok Masyarakat
<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan pedoman teknis yang jelas untuk semua jenis bangunan tentang penerapan standar bangunan hijau sesuai Peraturan Gubernur No. 38 Tahun 2012. • Menginisiasi Program Sertifikasi Bangunan Hijau sebagai strategi untuk memantau kepatuhan semua jenis bangunan • Menerapkan langkah-langkah bangunan hijau di semua gedung pemerintah, gedung publik, sekolah, rumah sakit, dll sesuai dengan pedoman teknis yang dikembangkan sesuai Peraturan Gubernur No. 38 Tahun 2012 serta kebijakan pengadaan yang berlaku. • Melakukan sosialisasi konsep dan peraturan tentang bangunan hijau • Memberikan apresiasi dan insentif kepada kelompok masyarakat dan badan usaha yang menerapkan konsep bangunan hijau 	<ul style="list-style-type: none"> • Menerapkan langkah-langkah bangunan hijau sesuai dengan pedoman teknis yang dikembangkan berdasarkan Peraturan Gubernur No. 38 Tahun 2012. • Berpartisipasi aktif dalam konsultasi, lokakarya dan sosialisasi dalam perumusan pedoman teknis dan konsekuensinya dalam pelaksanaan langkah-langkah bangunan hijau. • Melakukan audit pemantauan independen terhadap bangunan dan memberikan laporan kepada pemerintah provinsi terkait penerapan kebijakan bangunan hijau. • Berpartisipasi dalam Program Sertifikasi Bangunan Hijau untuk memastikan transparansi dalam proses sertifikasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Menerapkan langkah-langkah bangunan hijau di rumah, sekolah, dan tempat ibadah sesuai dengan pedoman teknis yang disusun berdasarkan Peraturan Gubernur No. 38 Tahun 2012. • Berpartisipasi aktif dalam konsultasi, lokakarya dan sosialisasi dalam perumusan pedoman teknis dan konsekuensinya dalam pelaksanaan langkah-langkah bangunan hijau.

Aksi Utama

Pengembangan perangkat dan mesin sederhana bertenaga surya untuk penggunaan sehari - hari

Indikator

- Setidaknya 5 perangkat dan mesin bertenaga surya baru yang ditujukan untuk penggunaan sehari - hari telah dikembangkan dan dipasarkan pada tahun 2030.

Aksi yang Dijanjikan (*Pledged Actions*)

Pemerintah Daerah	Kelompok Bisnis dan Pelaku Usaha	Kelompok Masyarakat
<ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan ruang dan dana awal bagi perusahaan rintisan dan universitas untuk berinovasi pada perangkat dan mesin bertenaga surya yang baru dan terjangkau untuk penggunaan praktis dalam kehidupan sehari-hari. • Menetapkan program pembelajaran tentang teknologi energi terbarukan untuk kaum muda. • Menyelenggarakan kompetisi pengembangan perangkat dan mesin bertenaga surya yang inovatif untuk penggunaan sehari-hari yang praktis. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengintensifkan penelitian dan pengembangan (R&D) agar penggunaan energi terbarukan terjangkau dan dapat diakses oleh semua orang. • Memperluas layanan konsultasi ahli kepada pemerintah provinsi untuk mendorong investasi dalam teknologi energi terbarukan termasuk perangkat bertenaga surya untuk penggunaan praktis. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengintensifkan penelitian dan pengembangan (R&D) agar penggunaan energi terbarukan terjangkau dan dapat diakses oleh semua orang.



Aksi Utama

Peningkatan kapasitas praktisi energi terbarukan

Indikator

- Setidaknya 500 praktisi energi terbarukan telah disertifikasi pada tahun 2030

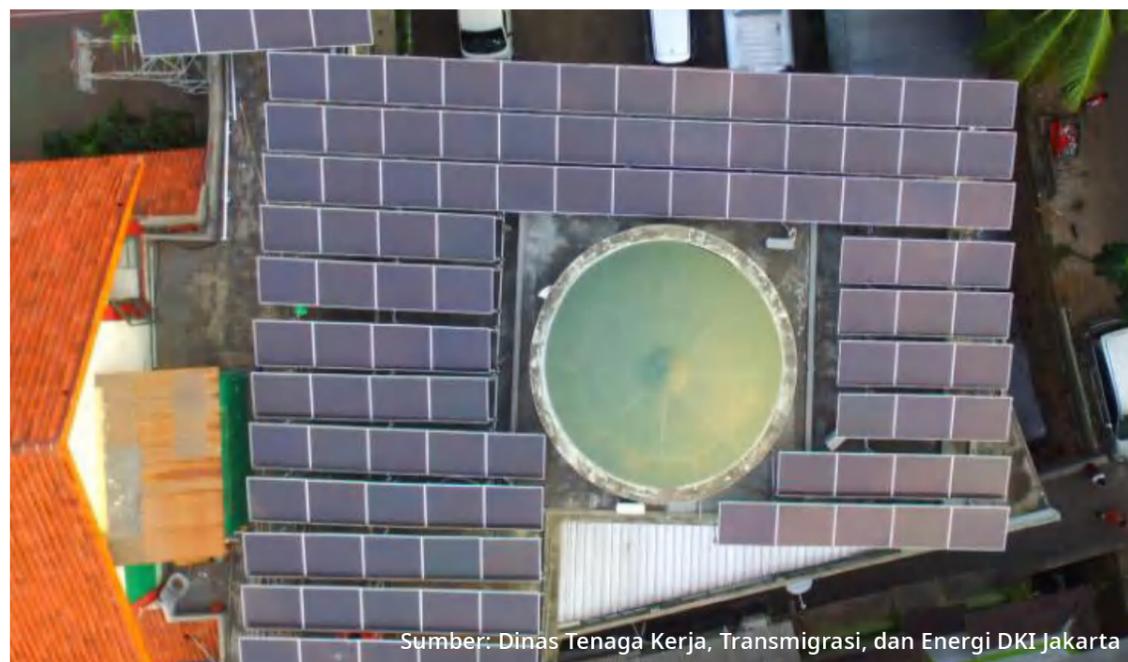
Aksi yang Dijanjikan (*Pledged Actions*)

Pemerintah Daerah	Kelompok Bisnis dan Pelaku Usaha	Kelompok Masyarakat
<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan dan menawarkan kursus pelatihan gratis tentang energi terbarukan bekerjasama dengan akademisi dan/atau OMS 	<ul style="list-style-type: none"> • Menawarkan layanan konsultasi ahli kepada pemerintah provinsi dalam pengembangan modul pelatihan dan sebagai fasilitator/dosen pelatihan • Memobilisasi karyawan yang relevan untuk berpartisipasi dalam kursus pelatihan ini untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan teknis mereka 	<ul style="list-style-type: none"> • Menawarkan layanan konsultasi ahli kepada pemerintah provinsi dalam pengembangan modul pelatihan dan sebagai fasilitator/dosen pelatihan • Menyelenggarakan kursus pelatihan kepada anggota sendiri • Menyelenggarakan kompetisi, melakukan studi penelitian, dan mengimplementasikan proyek skala komunitas untuk memfasilitasi penerapan praktis pembelajaran dari kursus pelatihan



Transportasi dan Kualitas Udara

Aksi Utama		
Investasi energi terbarukan		
Indikator		
<ul style="list-style-type: none"> Investasi energi surya sebesar 35 MW telah tercapai pada tahun 2030 		
Aksi yang Dijanjikan (<i>Pledged Actions</i>)		
Pemerintah Daerah	Kelompok Bisnis dan Pelaku Usaha	Kelompok Masyarakat
<ul style="list-style-type: none"> Mengembangkan peta lokasi optimal untuk instalasi energi surya di seluruh Jakarta yang interaktif dan dapat diakses publik Memasang panel surya atap di semua gedung pemerintah yang dapat memanfaatkan energi matahari berdasarkan peta yang dikembangkan. Memberikan apresiasi dan insentif kepada pemilik gedung yang secara sukarela memasang panel surya atap di gedung mereka. 	<ul style="list-style-type: none"> Menawarkan keahlian dalam konsultasi, data, dan sumber daya kepada pemerintah provinsi dalam pengembangan peta lokasi optimal untuk instalasi energi surya di seluruh Jakarta yang interaktif dan dapat diakses publik Memasang panel surya atap di gedung sendiri Membentuk konsorsium dengan badan usaha lain untuk mengumpulkan dana guna membantu pemasangan panel surya di atap gedung seperti sekolah dan tempat ibadah. 	<ul style="list-style-type: none"> Menawarkan keahlian dalam konsultasi, data, dan sumber daya kepada pemerintah provinsi dalam pengembangan peta lokasi optimal untuk instalasi energi surya di seluruh Jakarta yang interaktif dan dapat diakses publik. Memasang panel surya atap di gedung sendiri Membina kemitraan dengan konsorsium bisnis yang berkomitmen untuk berinvestasi dalam pemasangan panel surya di atap gedung seperti sekolah dan tempat ibadah serta komunitas perumahan.kursus pelatihan



Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta

Aksi-Aksi Utama

- Menyediakan infrastruktur untuk mobilitas aktif yang mudah diakses oleh kelompok dengan keterbatasan fisik (seperti difabel, lanjut usia, dll.)
- Peningkatan kualitas infrastruktur untuk meningkatkan interkoneksi angkutan umum yang dapat diakses oleh kelompok dengan keterbatasan fisik (seperti difabel, lanjut usia, dll.)
- Mendorong penggunaan transportasi umum
- Mendorong mobilitas aktif
- Mematuhi standar kualitas udara
- Mendorong penggunaan bahan bakar bersih untuk kendaraan
- Penggunaan kendaraan listrik
- Pengujian emisi kendaraan
- Penghijauan jalur angkutan umum
- Berbagi kendaraan

B. Transportasi dan Kualitas Udara

Sektor transportasi merupakan sektor yang paling besar dalam penggunaan energi, menyumbang 47,4% dari total kebutuhan energi tahun 2018 di DKI Jakarta, menjadikannya salah satu penyumbang utama emisi GRK di DKI Jakarta¹⁰. Meningkatnya jumlah kendaraan pribadi ditambah dengan sekitar 1,2 juta orang yang melakukan perjalanan ke Jakarta memperburuk kemacetan lalu lintas di Jakarta¹¹. Akibatnya, berkontribusi terhadap penurunan kualitas udara karena 75% pencemaran udara di DKI Jakarta disebabkan oleh jasa transportasi darat¹².

Emisi GRK untuk sektor transportasi termasuk dalam perhitungan emisi di sektor energi. Sebagaimana dibahas pada sub-bagian sebelumnya, sektor energi menyumbang 95,3% dari total estimasi emisi provinsi, sementara sub-sektor transportasi menyumbang 39,7% dari total emisi sektor energi (*direct emission*) atau setara dengan 7.498 ribu ton CO₂e. Berdasarkan target mitigasi di sektor energi, target **sektor transportasi dalam upaya pengurangan emisi GRK DKI Jakarta adalah 10.051.000 tCO₂e pada tahun 2030 (31%) dan 9.797.000 tCO₂e pada tahun 2050 (17%)**. Menurut peta jalan mitigasi provinsi, langkah-langkah berikut harus dilakukan untuk memenuhi dan memantau target ini: peningkatan pengujian emisi kendaraan, peralihan bahan bakar kendaraan dari solar ke biofuel, penggunaan kendaraan listrik, peningkatan BRT, MRT, LRT, dan sistem kendaraan listrik untuk memungkinkan warga beralih dari penggunaan mobil pribadi ke transportasi umum, dan peningkatan jalur pejalan kaki dan sepeda untuk mendorong warga mempraktikkan mobilitas aktif¹³. Secara bersamaan, Instruksi Gubernur No. 66 Tahun 2019 tentang Pengendalian Pencemaran Udara mengatur pelaksanaan dan pemantauan kualitas standar emisi kendaraan untuk mengatasi pencemaran udara di Jakarta. Peta jalan dan peraturan ini didukung dan dilengkapi dengan aksi iklim yang dijanjikan dalam sektor transportasi dan kualitas udara oleh pemangku kepentingan yang berbeda seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Aksi yang dijanjikan hanya mempertimbangkan sektor transportasi formal karena kurangnya keterwakilan sektor transportasi informal dalam proses konsultasi. Oleh karena itu, sangat disarankan agar sektor transportasi informal diberi suara dan peran yang lebih aktif dalam Forum Ikhtiar Jakarta pertama dan dalam proses pemutakhiran Ikhtiar Jakarta untuk mengisi celah ini dalam dokumen saat ini.

Strategi: Pergeseran moda dari penggunaan kendaraan pribadi ke penggunaan transportasi umum dan mobilitas aktif

Tujuan: Untuk berkontribusi pada pengurangan emisi GRK di sektor transportasi hingga 10.051.000 tCO₂e pada tahun 2030 dan 9.797.000 tCO₂e pada tahun 2050 dengan meningkatkan *moda share* transportasi umum dan mobilitas aktif.

¹⁰ Laporan Inventarisasi GRK dan Penurunan Emisi GRK Provinsi DKI Jakarta. 2019

¹¹ BPS. Statistik Komuter Jabodetabek . 2019. Sumber: [link](#)

¹² Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019. 2019

¹³ Studi Pendahuluan: Strategi Jangka Panjang Menuju Pembangunan Rendah Karbon DKI Jakarta 2050, 2020

Aksi Utama

Menyediakan infrastruktur untuk mobilitas aktif yang mudah diakses oleh kelompok dengan keterbatasan fisik (seperti difabel, lanjut usia, dll.)

Indikator

- Semua bangunan publik dan swasta eksisting maupun baru telah mengalokasikan minimal 10% dari ruang parkir yang tersedia untuk parkir sepeda sesuai instruksi dan pedoman yang ditetapkan oleh Peraturan Gubernur No. 51 Tahun 2020 dan Peraturan Gubernur No. 38 Tahun 2012.
- Setidaknya 50 lokasi persewaan sepeda berbasis aplikasi yang terintegrasi dengan moda transportasi umum formal lainnya dibangun pada tahun 2030
- Setidaknya 150 km jalur sepeda telah dibangun pada tahun 2030
- Setidaknya 600 km jalur pejalan kaki telah dibangun pada tahun 2030

Aksi yang Dijanjikan (*Pledged Actions*)

Pemerintah Daerah	Kelompok Bisnis dan Pelaku Usaha	Kelompok Masyarakat
<ul style="list-style-type: none"> • Membangun infrastruktur untuk transportasi tanpa kendaraan bermotor (jalan kaki dan bersepeda) yang inklusif dan terintegrasi dengan transportasi umum seperti jalur pejalan kaki dan sepeda, tempat parkir sepeda, dan kamar mandi • Menyediakan instalasi seperti elevator, trem, dek rendah, lantai berwarna terang, dan lift untuk memberikan akses yang lebih baik bagi orang-orang dengan keterbatasan fisik. • Menyediakan fasilitas penyimpanan sepeda di transportasi umum • Menegakkan peraturan mengenai fungsi jalur pejalan kaki dan sepeda • Menetapkan kebijakan yang mendukung dan menciptakan kerangka kerja kolaboratif dengan perusahaan rintisan (<i>start-up</i>) yang mengembangkan fasilitas persewaan sepeda. • Menetapkan kebijakan yang akan mengatur pengoperasian fasilitas penyewaan sepeda untuk memastikan integrasi yang baik dengan sistem transportasi umum Jakarta. 	<ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan fasilitas bagi pejalan kaki dan pengendara sepeda yang inklusif dan terintegrasi dengan transportasi umum seperti jalur pejalan kaki, jalur sepeda, tempat parkir sepeda dan kamar mandi di area kantor dan operasional • Menyediakan fasilitas untuk kelompok disabilitas yang terintegrasi dengan transportasi umum seperti lift prioritas dan jalur khusus di gedung komersial • Berkolaborasi dengan pemerintah untuk menyediakan penyewaan sepeda berbasis aplikasi di ruang publik 	<ul style="list-style-type: none"> • Menawarkan keahlian kepada pemerintah provinsi dalam desain fasilitas infrastruktur untuk mobilitas aktif. • Memanfaatkan dan menjaga kualitas infrastruktur untuk transportasi (berjalan dan bersepeda) yang inklusif dan terintegrasi dengan transportasi umum seperti jalur pejalan kaki dan sepeda, tempat parkir sepeda, dan kamar mandi • Memanfaatkan dan menjaga kualitas infrastruktur untuk meningkatkan aksesibilitas bagi penyandang keterbatasan fisik yang terintegrasi dengan transportasi umum seperti lift prioritas dan jalur khusus

Aksi Utama

Peningkatan kualitas infrastruktur untuk meningkatkan interkoneksi angkutan umum yang dapat diakses oleh kelompok dengan keterbatasan fisik (seperti difabel, lanjut usia, dll.)

Indikator

- Semua sistem transportasi massal (BRT, MRT, LRT) terintegrasi dengan moda transportasi lain (pejalan kaki, sepeda, bus pengumpan, mikrolet, dll.) untuk pengalaman transit yang lebih baik
- Semua layanan transportasi umum memenuhi standar kepuasan pelanggan
- Setidaknya 1 juta komuter per hari telah beralih dari penggunaan kendaraan pribadi dan dilayani secara memadai oleh sistem transportasi umum

Aksi yang Dijanjikan (*Pledged Actions*)

Pemerintah Daerah	Kelompok Bisnis dan Pelaku Usaha	Kelompok Masyarakat
<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan jumlah bus pengumpan (<i>feeder</i>) • Meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum (kenyamanan), terutama bagi para komuter dengan keterbatasan fisik • Meningkatkan interkoneksi berbagai moda transportasi umum • Menambah jumlah rambu atau penanda rute ke angkutan umum terdekat • Mengembangkan aplikasi terintegrasi yang memberikan informasi <i>real time</i> terkait jadwal transportasi umum 	<ul style="list-style-type: none"> • Bekerja sama dengan pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dan sistem transportasi terpadu yang ramah komuter • Menyediakan bus pengumpan (<i>feeder</i>) dari kompleks perkantoran ke titik transportasi umum terdekat. • Terlibat secara aktif dalam kampanye yang mempromosikan penggunaan transportasi umum 	<ul style="list-style-type: none"> • Menawarkan keahlian kepada pemerintah provinsi dalam desain fasilitas infrastruktur untuk interkoneksi yang lebih lancar. • Aktif menggunakan transportasi umum • Memelihara infrastruktur transportasi umum • Berpartisipasi aktif dalam konsultasi dan kampanye yang mempromosikan penggunaan transportasi umum dan kartu JakLingko di kalangan masyarakat



Sumber: Gema Saputera - Unsplash

Aksi Utama

Mendorong penggunaan transportasi umum

Indikator

- Setidaknya moda *share* angkutan umum mencapai 60% pada tahun 2030

Aksi yang Dijanjikan (*Pledged Actions*)

Pemerintah Daerah	Kelompok Bisnis dan Pelaku Usaha	Kelompok Masyarakat
<ul style="list-style-type: none"> • Mengeluarkan kebijakan untuk mendorong pegawai pemerintah beralih ke transportasi umum • Penerapan kebijakan pembatasan penggunaan kendaraan pribadi, seperti <i>Electronic Road Pricing</i> (ERP), penerapan skema ganjil genap (plat nomor) • Menerapkan zona rendah emisi (<i>low emission zone</i>) atau <i>car free day</i> di lokasi tertentu • Memberikan kebijakan insentif seperti potongan harga untuk lansia dan pelajar 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengeluarkan kebijakan perusahaan yang mendorong semua karyawan untuk beralih ke transportasi umum 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan beralih ke transportasi umum • Berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan zona rendah emisi (<i>low emission zone</i>) atau <i>car free day</i> di lokasi tertentu • Berpartisipasi aktif dalam konsultasi, advokasi dan kampanye penggunaan transportasi umum



Sumber: Rangga Cahya Nugraha - Unsplash

Aksi Utama

Mendorong mobilitas aktif

Indikator

- Peningkatan tingkat kepuasan pengguna infrastruktur pejalan kaki dan sepeda tercapai

Aksi yang Dijanjikan (*Pledged Actions*)

Pemerintah Daerah	Kelompok Bisnis dan Pelaku Usaha	Kelompok Masyarakat
<ul style="list-style-type: none"> • Mengeluarkan himbauan untuk mengajak pegawai pemerintah untuk berjalan kaki dan/atau bersepeda untuk perjalanan jarak dekat • Memantau jalur pejalan kaki untuk memastikan keamanan pejalan kaki 	<ul style="list-style-type: none"> • Menerapkan bangunan yang aktif (<i>active frontage</i>) di gedung dan properti perusahaan untuk meningkatkan kemauan karyawan untuk berjalan • Mendorong dan memberikan apresiasi kepada karyawan yang menggunakan sepeda dan berjalan kaki 	<ul style="list-style-type: none"> • Berjalan kaki untuk perjalanan jarak di bawah 1 km dan menggunakan sepeda dalam aktivitas sehari-hari • Berpartisipasi aktif dalam kampanye yang mempromosikan penggunaan transportasi tidak bermotor seperti berjalan kaki dan bersepeda. • Melakukan advokasi penegakan kebijakan bagi pelanggar hak pejalan kaki dan pesepeda untuk memastikan keselamatan



Aksi Utama

Mematuhi standar kualitas udara

Indikator

- Pengukuran parameter polutan PM 10 dan PM 2.5 dilakukan secara rutin
- Emisi kendaraan sesuai dengan standar kualitas udara nasional dan internasional

Aksi yang Dijanjikan (*Pledged Actions*)

Pemerintah Daerah	Kelompok Bisnis dan Pelaku Usaha	Kelompok Masyarakat
<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan sistem publikasi pemantauan kualitas udara secara waktu nyata (<i>real time</i>) • Penegakan hukum tentang standar kualitas parameter polutan • Menambahkan stasiun pemantauan kualitas udara (SPKU) • Menyebarkan informasi tentang data kualitas udara secara real-time kepada publik • Membangun platform untuk menyebarkan informasi tentang peraturan dan program kualitas udara serta untuk memberikan umpan balik (<i>feedback</i>) dan saran dari warga 	<ul style="list-style-type: none"> • Mematuhi standar kualitas udara minimum dan mengambil tindakan aktif untuk terus meningkatkan efisiensi teknologi pengendalian polusi udara di gedung/fasilitas dan kendaraan. • Memberikan laporan pemantauan kualitas udara secara berkala kepada instansi terkait dan publik. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mematuhi standar kualitas udara minimum dan mengambil tindakan aktif untuk terus meningkatkan efisiensi teknologi pengendalian polusi udara di gedung/fasilitas dan kendaraan. • Memberikan laporan pemantauan kualitas udara secara berkala kepada instansi terkait dan publik. • Membantu pemerintah provinsi dalam pemantauan kepatuhan industri penghasil polutan di seluruh Jakarta • Berpartisipasi aktif dalam konsultasi dan advokasi peningkatan standar kualitas parameter polutan • Melakukan studi penelitian dan rekomendasi untuk terus meningkatkan pemantauan kualitas udara dan program pengurangan polusi udara.



Aksi Utama

Mendorong Penggunaan bahan bakar bersih untuk kendaraan

Indikator

- Semua kendaraan pemerintah provinsi dan sistem transportasi umum menggunakan bahan bakar nabati (biofuel)

Aksi yang Dijanjikan (*Pledged Actions*)

Pemerintah Daerah	Kelompok Bisnis dan Pelaku Usaha	Kelompok Masyarakat
<ul style="list-style-type: none"> • Moda transportasi umum beralih dari penggunaan solar/bensin ke biofuel • Mendorong sektor swasta untuk beralih dari solar/bensin ke biofuel untuk penggunaan bahan bakar kendaraan mereka 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengganti armada perusahaan secara bertahap dengan kendaraan yang menggunakan bahan bakar nabati • Memproduksi kendaraan yang menggunakan biofuel yang terjangkau untuk tersedia di pasar 	<ul style="list-style-type: none"> • Membantu pemerintah provinsi dalam mengedukasi pemilik kendaraan untuk beralih dari solar/bensin ke biofuel

Aksi Utama

Penggunaan kendaraan listrik

Indikator

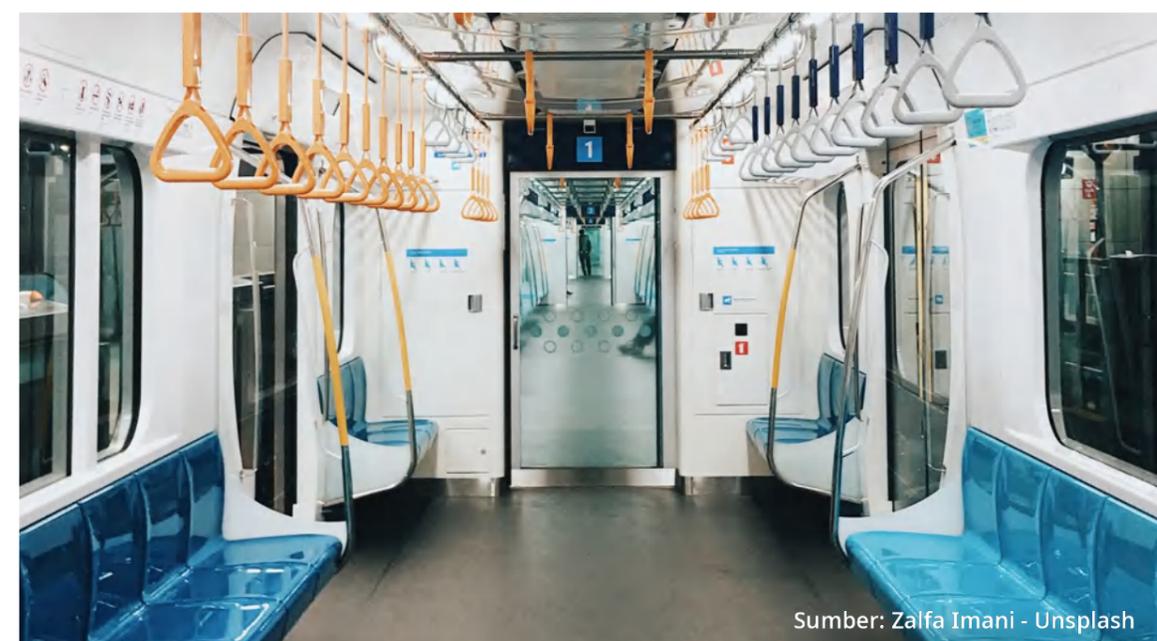
- Meningkatkan share penggunaan kendaraan listrik sebagai moda transportasi umum

Aksi yang Dijanjikan (*Pledged Actions*)

Pemerintah Daerah	Kelompok Bisnis dan Pelaku Usaha	Kelompok Masyarakat
<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan kendaraan listrik sebagai pilihan transportasi umum di seluruh provinsi bekerja sama dengan sektor swasta • Membangun stasiun pengisian kendaraan listrik bertenaga surya di lokasi strategis. • Mengalokasikan ruang untuk stasiun pengisian kendaraan listrik bertenaga surya 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengganti armada perusahaan secara bertahap dengan kendaraan listrik • Membantu pemerintah provinsi dalam mengidentifikasi dan mengalokasikan stasiun pengisian tenaga surya di dalam propertinya • Menyelenggarakan pelatihan pada retrofit kendaraan berbahan bakar minyak menjadi kendaraan listrik bekerja sama dengan pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> • Membantu pemerintah provinsi dalam mengidentifikasi dan mengalokasikan lokasi strategis untuk stasiun pengisian tenaga surya



Sumber: Fadhil - Unsplash



Sumber: Zalfa Imani - Unsplash

Aksi Utama		
Pengujian emisi kendaraan		
Indikator		
<ul style="list-style-type: none"> • Semua kendaraan umum dan pribadi lulus standar emisi kendaraan 		
Aksi yang Dijanjikan (Pledged Actions)		
Pemerintah Daerah	Kelompok Bisnis dan Pelaku Usaha	Kelompok Masyarakat
<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan jumlah lokasi untuk pusat pengujian emisi kendaraan dan menyediakan pengujian emisi yang mudah untuk semua kendaraan • Menetapkan standar emisi yang lebih ketat untuk semua jenis kendaraan • Menegakkan kebijakan dan memberikan disinsentif bagi pemilik kendaraan yang tidak memenuhi standar minimum emisi kendaraan 	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan uji emisi untuk semua kendaraan operasional maupun kendaraan pribadi karyawan • Melakukan perawatan kendaraan secara berkala untuk menjaga efisiensi bahan bakar 	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan uji emisi untuk semua kendaraan operasional maupun kendaraan pribadi • Melakukan perawatan kendaraan secara berkala untuk menjaga efisiensi bahan bakar



Sumber: Al Fadhli - Unsplash

Aksi Utama		
Penghijauan jalur angkutan umum		
Indikator		
<ul style="list-style-type: none"> • Seluruh jalur transportasi publik dan pejalan kaki ditanami pohon dan tanaman hijau 		
Aksi yang Dijanjikan (Pledged Actions)		
Pemerintah Daerah	Kelompok Bisnis dan Pelaku Usaha	Kelompok Masyarakat
<ul style="list-style-type: none"> • Penanaman kembali kanopi hijau pengganti di sepanjang jalur pengembangan angkutan umum (khususnya BRT, MRT, LRT) sebagai bagian dari moda transportasi yang terintegrasi • Melakukan penanaman pohon dan penghijauan di sepanjang rute pejalan kaki menuju transportasi umum 	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat pagar hijau di sepanjang jalur kendaraan di sekitar gedung dan properti perusahaan, jika memungkinkan 	<ul style="list-style-type: none"> • Menjaga kanopi hijau di jalur transportasi dan area umum. • Menawarkan layanan konsultasi ahli kepada pemerintah provinsi dalam desain penghijauan rute transportasi umum untuk memaksimalkan manfaat tambahan, antara lain, seperti peningkatan kualitas udara, kemudahan berjalan kaki, dan estetika.

Aksi Utama		
Berbagi kendaraan		
Indikator		
<ul style="list-style-type: none"> • Setidaknya 500 bus sekolah dan 70 rute bus sekolah beroperasi pada tahun 2030 		
Aksi yang Dijanjikan (Pledged Actions)		
Pemerintah Daerah	Kelompok Bisnis dan Pelaku Usaha	Kelompok Masyarakat
<ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan layanan bus bagi pegawai pemerintah dan murid sekolah untuk mendorong peralihan dari penggunaan kendaraan pribadi 	<ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan layanan bus karyawan • Mengembangkan advokasi perusahaan tentang berbagi kendaraan di antara karyawan 	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan berbagi kendaraan dengan teman sebaya dengan memanfaatkan layanan bus karyawan dan sekolah • Melakukan berbagi kendaraan di kendaraan pribadi

Limbah Padat

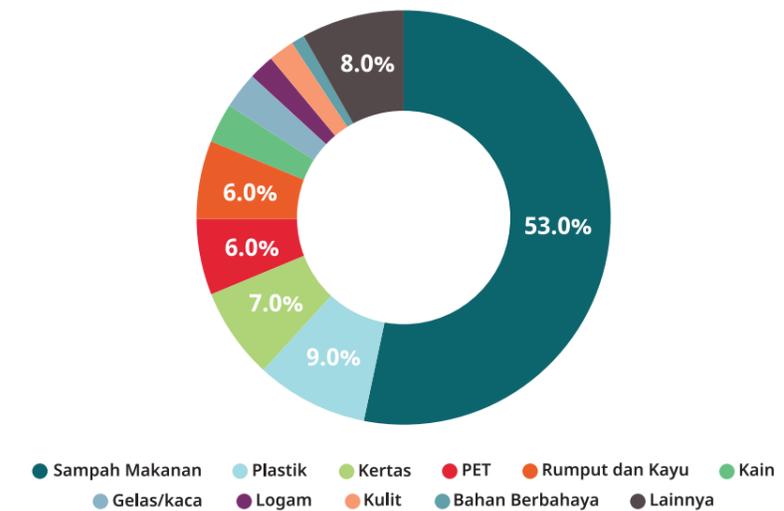
Aksi-Aksi Utama

- a. Pengurangan, pemilahan, dan daur ulang sampah di sumbernya
- b. Program pengolahan sampah menjadi sumberdaya (*waste-to-resource*) skala masyarakat dan menengah
- c. Implementasi Perluasan Tanggung Produsen atau *Extended Producer Responsibility* (EPR)
- d. Inovasi dan produksi produk rumah tangga yang ramah lingkungan
- e. Pengurangan sampah makanan
- f. Pengurangan penggunaan kemasan plastik sekali pakai dan mendorong penggunaan produk daur ulang

C. Limbah Padat

Pada 2019, DKI Jakarta mencatat timbulan sampah harian sebesar 7.702 ton. Lebih dari separuh sampah tersebut berasal dari rumah tangga (60%), diikuti oleh perkantoran komersial dan institusi (22,48%), sampah yang dikumpulkan di jalan (10,04%). Sampah makanan mendominasi komposisi sampah DKI Jakarta sebesar 53%, diikuti plastik (9%), kertas (7%)¹⁴. Sekitar 90% sampah yang dihasilkan diangkut ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Bantar Gebang yang terletak di Kota Bekasi untuk diproses lebih lanjut melalui daur ulang dan pengomposan. TPA Bantar Gebang hampir mencapai kapasitas maksimalnya dan hanya mampu menampung sekitar 10 juta ton sampah pada tahun-tahun berikutnya¹⁵. Terbatasnya lahan yang tersedia menjadikan perluasan area TPA bukan menjadi suatu solusi, sehingga diperlukan pengelolaan sampah dari tingkat sumber.

Komposisi Sampah Jakarta



Gambar 6. Strategi prioritas per sektor Ikhtiar Jakarta

Selain itu, menurut inventarisasi GRK DKI Jakarta 2010, sektor sampah menyumbang sekitar 4,6% dari total emisi provinsi. Emisi ini meliputi emisi di subsektor limbah padat dan air limbah. Untuk mencapai target mitigasi DKI Jakarta, **provinsi ini perlu mengurangi emisi GRK di sub-sektor persampahan hingga 1.401.000 tCO₂e pada tahun 2030 (4,3%) dan 2.691.000 tCO₂e pada tahun 2050 (4,9%)**. Beberapa tindakan yang diidentifikasi untuk memenuhi target ini termasuk pengurangan pembuangan limbah ke tempat pembuangan sampah melalui kebijakan dan praktik 3R serta pengurangan dan pengelolaan sampah organik yang lebih baik¹⁶. Sesuai Peraturan Gubernur Nomor 108 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah

¹⁴ Laporan Inventarisasi GRK dan Penurunan Emisi GRK Provinsi DKI Jakarta. 2019

¹⁵ Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019. 2019

¹⁶ Studi Pendahuluan: Strategi Jangka Panjang Menuju Pembangunan Rendah Karbon DKI Jakarta 2050, 2020

Provinsi DKI Jakarta Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Jakstrada), DKI Jakarta menargetkan pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga hingga 30% pada tahun 2025. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah provinsi DKI Jakarta juga telah mengeluarkan beberapa kebijakan seperti Peraturan Gubernur No. 77 Tahun 2020 mengenai pengelolaan sampah lingkup RW dan Instruksi Gubernur No. 107 Tahun 2019 mengenai pengurangan dan pemilahan sampah di lingkungan pemerintah.

Untuk berkontribusi pada upaya DKI Jakarta dalam mengatasi tantangan pengelolaan sampah perkotaan sekaligus mengurangi emisinya, ACP melaksanakan proyek percontohan pengelolaan sampah skala masyarakat menggunakan sistem *Black Soldier Fly* (BSF) di TPST Rawasari. Proyek percontohan ini diharapkan dapat mengolah setidaknya satu ton sampah organik setiap harinya dan dapat berkontribusi pada pengurangan emisi GRK sekitar 400 tCO₂e setiap tahun. Berdasarkan temuan dari implementasi kegiatan percontohan tersebut yang memiliki potensi untuk ditingkatkan di DKI Jakarta dan direplikasi di kota-kota lain di Indonesia, intervensi ini juga termasuk dalam daftar aksi yang dijanjikan yang diuraikan dalam tabel di bawah ini. RAD GRK dan Strategi Jangka Panjang Menuju Pembangunan Rendah Karbon DKI Jakarta 2050 mengidentifikasi peta jalan mitigasi yang dapat mengarah pada pencapaian target pengurangan GRK di sektor persampahan. Sementara itu, aksi yang dijanjikan yang disebutkan di bawah ini berusaha untuk melengkapi aksi yang terdapat dalam peta jalan.

Strategi : Pengurangan dan pengolahan limbah padat (sampah) di sumber

Tujuan : Berkontribusi pada pengurangan emisi GRK di subsektor persampahan hingga menjadi 1.401.000 tCO₂e pada tahun 2030 dan 2.691.000 tCO₂e pada tahun 2050 dengan mengurangi timbulan sampah dan meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah.



Sumber: Refhad - Unsplash

Aksi Utama

Pengurangan, pemilahan, dan daur ulang sampah di sumbernya

Indikator

- Volume sampah berkurang setidaknya 30% pada tahun 2025
- Setidaknya 5.000 anggota Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) telah dilibatkan dan diberdayakan dalam praktik (*reduce reuse recycle*) 3R
- Setidaknya 70% sampah yang dikumpulkan telah dipilah dengan baik menjadi sampah organik dan anorganik

Aksi yang Dijanjikan (*Pledged Actions*)

Pemerintah Daerah	Kelompok Bisnis dan Pelaku Usaha	Kelompok Masyarakat
<ul style="list-style-type: none"> • Mengeluarkan surat edaran yang menghimbau pengurangan, pemilahan, dan daur ulang sampah di gedung dan fasilitas umum. • Menyusun dan mengimplementasikan rencana aksi pengelolaan sampah bekerjasama dengan pelaku usaha dan organisasi masyarakat • Menyediakan depot pengisian air minum di gedung dan fasilitas umum, sekolah, dan terminal untuk menghindari timbulan sampah dari botol plastik sekali pakai • Menetapkan batasan minimal timbulan sampah bagi penghasil sampah pada periode pengumpulan tertentu dan memberikan • Mengeluarkan skema insentif untuk pelaku bisnis yang mengurangi sampah dan mendorong model sirkular • Memfasilitasi inisiatif warga yang menjadikan sampah memiliki nilai ekonomi (program pengolahan sampah menjadi sumber daya berbasis masyarakat) 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengeluarkan kebijakan internal perusahaan untuk mempraktikkan pengurangan, pemilahan, dan daur ulang sampah di area operasional dan kantor • Menyediakan stasiun pengisian air minum di seluruh area perusahaan untuk menghindari timbulan limbah dari botol plastik sekali pakai • Menyiapkan fasilitas daur ulang bekerja sama dengan pemerintah provinsi • Mendukung pelaksanaan program pengolahan sampah menjadi sumber daya berbasis masyarakat dengan menyediakan ruang pasar untuk produk daur ulang 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengeluarkan kebijakan internal kelompok / organisasi untuk mempraktikkan kegiatan pengurangan, pemilahan, dan daur ulang sampah di area kegiatan • Mencegah penggunaan dan mengadvokasi penolakan plastik sekali pakai di antara anggota • Memulai kampanye tentang kebijakan 3R dan menerapkan kegiatan 3R di tingkat rumah tangga dan entitas bekerjasama dengan sekolah dan universitas untuk mengembangkan materi komunikasi yang efektif dan jangkauan yang lebih luas • Relawan dalam pengelolaan bank sampah masyarakat (misalnya pengumpulan, pemilahan, daur ulang) • Menyelenggarakan peningkatan kapasitas untuk memilah dan mengelola sampah dengan baik di lingkungan sekitar

Aksi Utama

Program pengolahan sampah menjadi sumberdaya (*waste-to-resource*) skala masyarakat dan menengah

Indikator

- Pembangunan dan pengoperasian fasilitas sistem pengelolaan sampah skala masyarakat seperti sistem *Black Soldier Fly* (BSF) dan fasilitas pengomposan di setiap lingkungan
- Setidaknya 10.000 individu telah terlibat secara aktif sebagai sukarelawan atau karyawan fasilitas pengelolaan sampah skala masyarakat
- Setidaknya 4 *Intermediate Treatment Facility* (ITF) dibangun di daerah dengan timbulan sampah tinggi pada tahun 2030

Aksi yang Dijanjikan (*Pledged Actions*)

Pemerintah Daerah	Kelompok Bisnis dan Pelaku Usaha	Kelompok Masyarakat
<ul style="list-style-type: none"> • Membangun <i>Intermediate Treatment Facility</i> (ITF) di area timbulan sampah yang tinggi • Melakukan peningkatan kapasitas teknis, administratif, dan keterlibatan masyarakat secara berkala bagi pengelola bank sampah dan ITF untuk pengelolaan yang efektif dan efisiensi operasi. • Mereplikasi pembangunan dan pengoperasian BSF di komunitas lain (sesuai kebutuhan) dengan menggunakan Fasilitas BSF di TPS Rawasari sebagai model untuk mengelola sampah organik • Memberikan apresiasi dan insentif kepada masyarakat yang berhasil menerapkan solusi pengelolaan sampah berbasis masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan dan menerapkan teknologi pengelolaan limbah yang ramah lingkungan dan hemat biaya • Menyelaraskan program <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) dengan implementasi solusi pengelolaan sampah skala masyarakat dari pemerintah provinsi dengan menawarkan bantuan teknis dan/atau keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Menawarkan keahlian kepada pemerintah provinsi dalam desain, implementasi, dan pemantauan program pengelolaan sampah skala masyarakat dan pengolahan sampah menjadi sumber daya berbasis masyarakat



Sumber: Hamza Javaid - Unsplash

Aksi Utama

Implementasi Perluasan Tanggung Produsen atau *Extended Producer Responsibility* (EPR)

Indikator

- Tersusun dan terlaksananya kebijakan EPR di DKI Jakarta
- Setidaknya 100 perusahaan manufaktur di Jakarta sepenuhnya mematuhi kebijakan EPR oleh DKI Jakarta

Aksi yang Dijanjikan (*Pledged Actions*)

Pemerintah Daerah	Kelompok Bisnis dan Pelaku Usaha	Kelompok Masyarakat
<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan sosialisasi undang-undang yang mencakup ketentuan EPR seperti UU no. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga • Merumuskan kebijakan terkait penerapan EPR di DKI Jakarta • Memberikan penghargaan bagi pelaku bisnis untuk menerapkan EPR, yaitu tanggung jawab perusahaan terhadap limbah yang dihasilkannya 	<ul style="list-style-type: none"> • Mematuhi peraturan tentang pengelolaan sampah yang mencakup ketentuan EPR seperti UU no. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga • Memberikan kompensasi bagi konsumen yang mengembalikan botol kemasan kepada perusahaan produsen melalui kerjasama dengan toko, minimarket dan supermarket 	<ul style="list-style-type: none"> • Berpartisipasi aktif dalam memantau penegakan hukum EPR • Mengirimkan kemasan produk ke produsen yang mempraktikkan EPR



Sumber: ICLEI Indonesia

Aksi Utama

Inovasi dan produksi produk rumah tangga yang ramah lingkungan

Indikator

- Setidaknya 1.000 orang dilatih dan dipekerjakan dalam produksi produk rumah tangga ramah lingkungan
- Sedikitnya 50 badan usaha / pelaku bisnis aktif terlibat dalam inovasi dan produksi produk rumah tangga yang ramah lingkungan

Aksi yang Dijanjikan (*Pledged Actions*)

Pemerintah Daerah	Kelompok Bisnis dan Pelaku Usaha	Kelompok Masyarakat
<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan modul tentang inovasi dan produksi produk rumah tangga ramah lingkungan dan menawarkan modul ini sebagai pelatihan di pusat pelatihan kejuruan. • Menyediakan fasilitas untuk inovasi dan produksi produk rumah tangga yang ramah lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> • Memproduksi dan/atau mendesain ulang produk rumah tangga agar lebih ramah lingkungan, tahan lama, dan dapat didaur ulang 	<ul style="list-style-type: none"> • Menawarkan layanan konsultasi ahli kepada pemerintah provinsi dalam pengembangan modul pelatihan untuk memproduksi produk rumah tangga yang ramah lingkungan untuk ditawarkan di balai pelatihan kejuruan • Menyelenggarakan program pelatihan untuk individu yang berminat, terutama menargetkan individu berpenghasilan rendah, pengangguran, dan bekerja <i>part-time</i>, berdasarkan modul yang dikembangkan untuk pusat pelatihan kejuruan • Melaksanakan program pemberdayaan masyarakat bagi individu terlatih bermitra dengan pemerintah provinsi dan sektor bisnis.



Aksi Utama

Pengurangan sampah makanan

Indikator

- Setidaknya 1.000 ton/hari pembuangan sampah makanan berkurang

Aksi yang Dijanjikan (*Pledged Actions*)

Pemerintah Daerah	Kelompok Bisnis dan Pelaku Usaha	Kelompok Masyarakat
<ul style="list-style-type: none"> • Merumuskan dan menetapkan kebijakan pengurangan sampah makanan di restoran dan hotel yang juga mencakup mekanisme insentif dan disinsentif • Membangun tempat pengumpulan limbah makanan dan fasilitas daur ulang seperti BSF, pengomposan, dan digester biogas untuk mengurangi pembuangan sampah makanan ke tempat pembuangan sampah • Membangun bank makanan untuk rumah tangga berpenghasilan rendah dan tunawisma bekerjasama dengan OMS dan/atau pelaku usaha • Membangun jaringan penghasil sampah makanan utama (rumah tangga, restoran, hotel, dll.) untuk dihubungkan dan memaksimalkan penggunaan tempat pengumpulan sampah makanan dan fasilitas daur ulang serta bank makanan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan infrastruktur transportasi dan penyimpanan produk pertanian untuk meminimalkan limbah dari tahap produksi dan distribusi • Melakukan studi untuk lebih memahami preferensi, ukuran porsi, tren, dan volume pelanggan di antara faktor-faktor lain untuk menentukan bahan dan menu yang akan mengurangi/menghilangkan sisa makanan • Mengadopsi fasilitas daur ulang limbah makanan sendiri seperti BSF, pengomposan, dan digester biogas. • Bergabung dengan jaringan penghasil sampah makanan utama (rumah tangga, restoran, hotel, dll.) untuk terhubung dan memaksimalkan penggunaan tempat pengumpulan sampah makanan dan fasilitas daur ulang. • Menyumbangkan bahan dan sisa makanan yang berlebih, bersih, dan tidak tersentuh ke bank makanan untuk rumah tangga berpenghasilan rendah dan tunawisma • Berkolaborasi dengan OMS/LSM yang mengelola bank makanan untuk jaminan kualitas dan distribusi yang tepat. • Menerapkan mekanisme diskon untuk produk makanan pada jam-jam tertentu di supermarket dan pasar umum. 	<ul style="list-style-type: none"> • Menghindari membeli terlalu banyak makanan yang dapat menghasilkan sampah • Hanya masak dan konsumsi makanan dalam jumlah yang cukup dan hindari menghasilkan terlalu banyak sisa makanan • Simpan produk makanan dengan benar • Menawarkan layanan konsultasi ahli dan berpartisipasi dalam sosialisasi perumusan kebijakan pengurangan limbah makanan di restoran dan hotel • Membangun tempat pengumpulan sampah makanan dan fasilitas daur ulang seperti BSF, pengomposan, dan digester biogas untuk mengurangi pembuangan sampah ke tempat pembuangan akhir • Membangun bank makanan untuk rumah tangga berpenghasilan rendah dan tunawisma • Bergabung dengan jaringan penghasil limbah makanan utama (rumah tangga, restoran, hotel, dll.) untuk memaksimalkan penggunaan tempat pengumpulan limbah makanan dan fasilitas daur ulang. • Berkolaborasi dengan penghasil limbah makanan utama yang menyumbangkan bahan dan sisa makanan yang berlebih, bersih, dan tidak tersentuh ke bank makanan untuk rumah tangga berpenghasilan rendah dan tunawisma dan berfungsi sebagai petugas kontrol kualitas.

Aksi Utama

Pengurangan penggunaan kemasan plastik sekali pakai dan mendorong penggunaan produk daur ulang

Indikator

- Setidaknya 5.000 orang terlibat sebagai advokat untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai
- Semua pusat perbelanjaan telah menghilangkan penggunaan kantong plastik sekali pakai
- Pembuangan sampah anorganik ke tempat pembuangan akhir berkurang setidaknya 50%
- Setidaknya terdapat empat kampanye per bulan tentang penggunaan produk yang dapat digunakan kembali disebarluaskan di semua platform di Jakarta

Aksi yang Dijanjikan (*Pledged Actions*)

Pemerintah Daerah	Kelompok Bisnis dan Pelaku Usaha	Kelompok Masyarakat
<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan sosialisasi untuk menentukan transisi yang adil dan merata dalam penerapan larangan penggunaan plastik sekali pakai • Memberlakukan, dan memantau kepatuhan terhadap peraturan yang melarang produksi dan penggunaan plastik sekali pakai sebagaimana Peraturan Gubernur No. 142 Tahun 2019 • Melakukan penelitian, menyebarkan informasi, dan menyediakan akses alternatif pengganti plastik sekali pakai bagi produsen dan konsumen • Mengeluarkan peraturan yang mewajibkan produsen produk (misalnya bumbu makanan, bahan, perlengkapan mandi, dll) yang sangat bergantung pada kemasan plastik untuk menyediakan tempat pengumpulan kemasan bekas yang ditempatkan secara strategis untuk didaur ulang serta untuk mendesain ulang kemasan produk agar dapat didaur ulang dengan baik. • Mengeluarkan peraturan yang mewajibkan produsen produk (misalnya bumbu makanan, bahan, perlengkapan mandi, dll.) untuk menyediakan fasilitas isi ulang untuk mengurangi sampah kemasan. • Mengeluarkan peraturan yang mewajibkan penggunaan produk yang dapat digunakan kembali untuk semua kegiatan dalam lingkup pemerintahan 	<ul style="list-style-type: none"> • Menawarkan alternatif kemasan kantong plastik dan menawarkan diskon kepada pelanggan yang membawa tas belanja dan wadahnya sendiri di supermarket dan pasar umum. • Produsen dan distributor produk menyediakan fasilitas pengisian ulang yang ditempatkan secara strategis dengan harga diskon untuk produk seperti bumbu makanan, bahan, perlengkapan mandi, dll. • Produsen dan distributor produk menyiapkan tempat pengumpulan kemasan bekas yang ditempatkan secara strategis untuk didaur ulang. • Produsen produk mendesain ulang kemasan produk untuk memungkinkan daur ulang yang lebih baik. • Produsen produk menyertakan informasi tentang dampak lingkungan dari produk mereka dalam kemasan 	<ul style="list-style-type: none"> • Menawarkan layanan konsultasi ahli dan berpartisipasi dalam sosialisasi dalam perumusan kebijakan yang melarang produksi dan penggunaan plastik sekali pakai untuk memberikan alternatif yang terjangkau dan dapat diakses serta mengamati transisi yang adil • Membantu pemerintah provinsi dalam memantau pelaksanaan kebijakan • Berkolaborasi dengan produsen dan distributor produk dalam menyediakan fasilitas pengisian ulang serta tempat pengumpulan kemasan bekas untuk lingkungan/komunitas daur ulang. • Membawa wadah dan tas belanja saat membeli produk di supermarket dan pasar umum. • Menyusun dan menyebarluaskan materi informasi, edukasi dan komunikasi yang efektif yang mengadvokasi dan mendorong warga untuk menolak plastik sekali pakai

Air

Aksi-Aksi Utama

- Pembuatan lubang biopori dan sumur resapan
- Pemanenan air hujan
- Peningkatan cakupan pelayanan air bersih
- Pengelolaan air limbah berkelanjutan
- Konservasi air
- Teknologi daur ulang air limbah
- Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) berkelanjutan

D. Air

Menurut data tahun 2017, cakupan pelayanan air bersih rumah tangga di Jakarta baru mencapai 60%¹⁷. Sebanyak 40% sisanya bergantung pada pasokan air pompa dari sumber air tanah, yang lebih dari setengahnya tercemar ringan¹⁸. Pengambilan air tanah juga memperburuk penurunan tanah di bagian utara provinsi yang membuat penduduk berisiko mengungsi karena terjadinya banjir pantai dan kenaikan permukaan laut. Untuk air limbah, cakupan pelayanan pengolahan air limbah domestik hanya sebesar 14,33%¹⁹. Air limbah domestik di Jakarta dikelola melalui sistem terpusat dan tangki septik rumah tangga individu. Namun, masih terdapat rumah tangga yang langsung membuang air limbahnya ke badan air (sungai/laut).

Inventarisasi GRK DKI Jakarta tahun 2010 menunjukkan bahwa sektor persampahan (baik limbah padat maupun limbah cair) menyumbang 6,5% dari total emisi provinsi. Untuk memenuhi target mitigasi DKI Jakarta, **provinsi perlu mengurangi emisi GRK di sub-sektor air limbah hingga 28.000 tCO₂e 2030 dan hingga 33.000 tCO₂e pada 2050**²⁰. Untuk mengatasi tantangan ganda ini, yaitu menyediakan pasokan air bersih yang memadai dan memperluas pengolahan air limbah domestik sambil juga mengurangi emisi GRK, DKI Jakarta bertujuan untuk meningkatkan layanan air bersih menjadi setidaknya 79,61% dan memperluas cakupan pengolahan air limbah domestik menjadi setidaknya 26,44% pada tahun 2022²¹. Langkah-langkah untuk memenuhi target ini termasuk pengoperasian instalasi pengolahan air limbah terpadu yang efektif dan efisien serta instalasi pengolahan lumpur. Langkah-langkah ini juga dipandang sebagai upaya provinsi untuk meningkatkan kapasitas adaptifnya, karena seluruh provinsi mengantisipasi periode panas dan kekeringan ekstrem yang meningkat dan berkepanjangan.

RAD GRK dan Strategi Jangka Panjang Menuju Pembangunan Rendah Karbon DKI Jakarta 2050 mengidentifikasi peta jalan mitigasi untuk sub sektor limbah cair. Tabel berikut berisi aksi yang dijanjikan oleh pemangku kepentingan yang berbeda untuk lebih mendorong implementasi target dan intervensi yang diidentifikasi dalam peta jalan.

Strategi : Meningkatkan akses pelayanan ke air bersih yang aman serta pengolahan limbah cair

Tujuan : Untuk berkontribusi pada pengurangan emisi GRK di subsektor air limbah hingga menjadi 28.000 tCO₂e pada tahun 2030 dan sebesar 33.000 tCO₂e pada tahun 2050 dengan meningkatkan cakupan layanan air bersih dan pengolahan air limbah domestik.

¹⁷ Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) DKI Jakarta 2018 - 2022

¹⁸ Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019. 2019

¹⁹ Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) DKI Jakarta 2018 - 2022

²⁰ Studi Pendahuluan: Strategi Jangka Panjang Menuju Pembangunan Rendah Karbon DKI Jakarta 2050. 2020

²¹ Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) DKI Jakarta 2018 - 2022

Aksi Utama

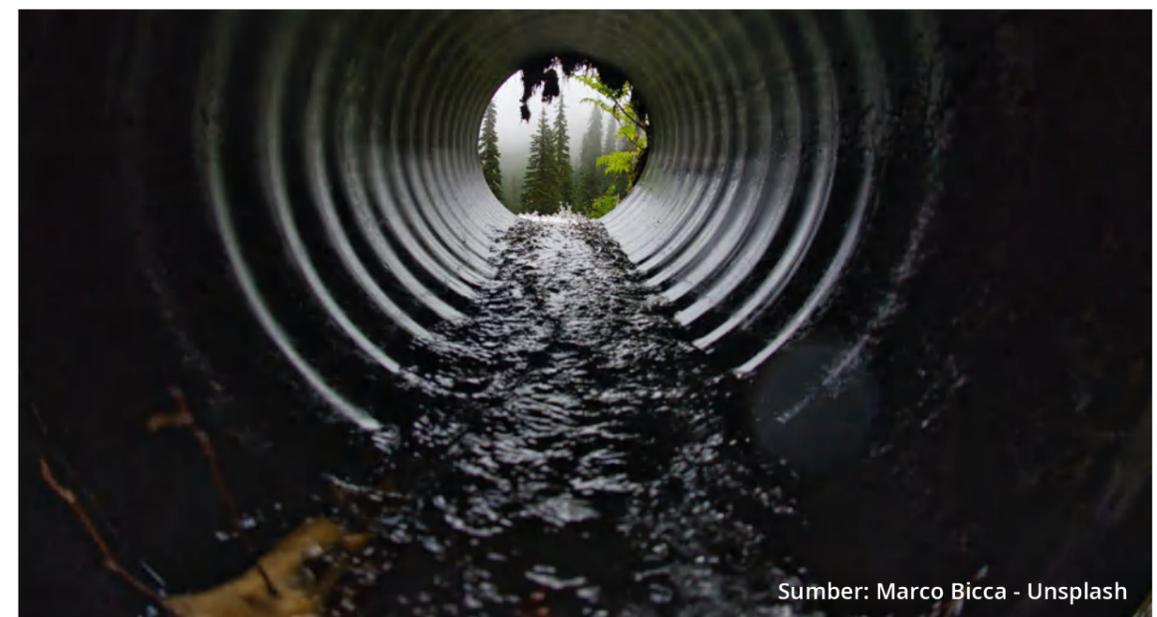
Pembuatan lubang biopori dan sumur resapan

Indikator

- Sedikitnya 700 sumur resapan dibangun di ruang terbuka hijau publik
- Setidaknya 300 sumur resapan dibangun di ruang terbuka hijau non-publik
- Sedikitnya 700.000 rumah tangga membangun lubang biopori

Aksi yang Dijanjikan (*Pledged Actions*)

Pemerintah Daerah	Kelompok Bisnis dan Pelaku Usaha	Kelompok Masyarakat
<ul style="list-style-type: none"> • Membuat lubang biopori dan sumur resapan pada gedung pemerintah, ruang publik, rumah sakit, terminal, sekolah dan lain-lain serta membuat sumur injeksi untuk menyimpan air di bawah tanah • Menyusun panduan pembuatan lubang biopori dan sumur resapan dan menyebarkannya kepada publik 	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat lubang biopori dan sumur resapan di area bangunan dan properti perusahaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembuatan lubang biopori dan sumur resapan di pemukiman penduduk, rumah ibadah dan sekolah. • Membangun sumur injeksi untuk menyimpan air untuk digunakan kembali bila diperlukan. • Menyusun inventarisasi lubang biopori di lingkungan sekitar dan melaporkannya secara berkala pada skala rumah tangga (RT) dan Rukun Warga (RW).



Sumber: Marco Bicca - Unsplash

Aksi Utama		
Pemanenan air hujan		
Indikator		
<ul style="list-style-type: none"> • Setidaknya 1 juta liter air hujan diolah dan digunakan kembali setiap tahun 		
Aksi yang Dijanjikan (<i>Pledged Actions</i>)		
Pemerintah Daerah	Kelompok Bisnis dan Pelaku Usaha	Kelompok Masyarakat
<ul style="list-style-type: none"> • Memasang fasilitas pemanenan air hujan di gedung pemerintah dan fasilitas umum termasuk rumah sakit dan sekolah. • Memberikan subsidi untuk pembangunan sarana pemanenan air hujan skala menengah hingga besar di masyarakat • Melakukan pelatihan tentang pembangunan fasilitas pemanenan air hujan untuk berbagai jenis bangunan • Melakukan sosialisasi secara berkala tentang pemanenan air hujan terutama manfaatnya sebagai tindakan adaptasi praktis, konservasi air dan penghematan biaya terkait. 	<ul style="list-style-type: none"> • Memasang fasilitas pemanenan air hujan dan daur ulang di gedung dan properti perusahaan • Mengembangkan fasilitas pemanenan air hujan yang terjangkau untuk berbagai jenis bangunan 	<ul style="list-style-type: none"> • Memasang fasilitas pemanenan air hujan dan daur ulang di gedung dan properti. • Membantu pemerintah provinsi dalam mengembangkan dan menyebarkan materi komunikasi, informasi dan edukasi yang efektif untuk membangun fasilitas pemanenan dan daur ulang air hujan untuk berbagai jenis bangunan serta manfaatnya seperti tindakan adaptasi praktis, konservasi air, dan penghematan biaya terkait.



Sumber: Dhyanyu L. Almitra - ICLEI Indonesia

Aksi Utama		
Peningkatan cakupan pelayanan air bersih		
Indikator		
<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan cakupan layanan air bersih hingga 100% pada tahun 2030 		
Aksi yang Dijanjikan (<i>Pledged Actions</i>)		
Pemerintah Daerah	Kelompok Bisnis dan Pelaku Usaha	Kelompok Masyarakat
<ul style="list-style-type: none"> • Pemeliharaan rutin instalasi pengolahan dan pipa distribusi. • Melakukan pemeriksaan berkala pada kualitas air keran di rumah tangga. • Menetapkan kebijakan disinsentif kepada pemilik gedung maupun rumah tangga yang memiliki layanan perpipaan tetapi tetap melakukan ekstraksi air tanah • Mempercepat perluasan dan pembangunan sambungan layanan perpipaan tambahan untuk rumah tangga yang belum terlayani. • Meningkatkan daur ulang air limbah untuk operasi sendiri guna mengurangi permintaan pasokan air. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemeliharaan rutin instalasi pengolahan dan pipa distribusi milik sendiri. • Meningkatkan daur ulang air limbah untuk operasi sendiri guna mengurangi ekstraksi air tanah. • Mengembangkan teknologi untuk mendeteksi secara <i>real time</i> dan pencegahan kebocoran air di pipa distribusi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Membantu pemerintah provinsi dalam menginventarisasi dan memprioritaskan rumah tangga terlayani guna memperoleh manfaat dari sambungan layanan tambahan. • Membantu pemerintah provinsi dalam memantau kebocoran air, pemborosan, dan sambungan ilegal. • Melakukan perawatan pipa air dengan benar untuk memastikan pengiriman air bersih yang efisien



Sumber: Anisetus-Palma - Unsplash

Aksi Utama

Pengelolaan air limbah berkelanjutan

Indikator

- Setidaknya 70% perusahaan swasta memiliki fasilitas pengelolaan pengolahan air limbah operasional
- Peningkatan cakupan pengolahan air limbah domestik menjadi 35% pada tahun 2030

Aksi yang Dijanjikan (*Pledged Actions*)

Pemerintah Daerah	Kelompok Bisnis dan Pelaku Usaha	Kelompok Masyarakat
<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan penegakkan hukum dan peraturan tentang pengelolaan air limbah untuk mencegah pencemaran air permukaan dan air tanah. • Membangun dan memperluas cakupan fasilitas pengelolaan air limbah domestik • Membangun fasilitas pengolahan dan daur ulang air limbah di gedung dan fasilitas umum seperti kantor, sekolah, dan rumah sakit. • Mengungkapkan kepada publik mengenai status penegakan dan kepatuhan entitas publik dan swasta pada peraturan pengelolaan air limbah setiap tahun 	<ul style="list-style-type: none"> • Memasang fasilitas pengolahan air limbah dan daur ulang di dalam bangunan dan properti milik sendiri. • Melaporkan secara teratur volume dan kualitas buangan air limbah serta langkah-langkah kepatuhan terhadap kebijakan pengelolaan air limbah kepada instansi terkait. 	<ul style="list-style-type: none"> • Memasang fasilitas pengolahan air limbah dan daur ulang di dalam bangunan dan properti milik sendiri maupun skala komunal • Menghindari membuang langsung air limbah yang mencemari/mengandung bahan kimia berbahaya (misalnya dari deterjen) ke sistem drainase dan badan



Sumber: Ivan Bandura - Unsplash

Aksi Utama

Konservasi air

Indikator

- Pengurangan sebesar 20% per tahun dalam penggunaan air dan biaya terkait di bangunan tempat tinggal dan umum

Aksi yang Dijanjikan (*Pledged Actions*)

Pemerintah Daerah	Kelompok Bisnis dan Pelaku Usaha	Kelompok Masyarakat
<ul style="list-style-type: none"> • Merumuskan dan menetapkan kebijakan tentang tindakan konservasi air untuk semua jenis pengguna. • Mengembangkan dan menyebarluaskan kampanye konservasi air yang menargetkan berbagai pemangku kepentingan. • Memberikan arahan kepada seluruh manajemen dan pegawai bangunan dan fasilitas umum untuk melakukan konservasi air, menghindari pemborosan air, dan melakukan perawatan rutin untuk mencegah kebocoran air 	<ul style="list-style-type: none"> • Menyarankan program CSR dengan langkah-langkah pemerintah dan kampanye konservasi air. • Mengeluarkan himbauan di perusahaan untuk mempraktikkan konservasi air, menghindari pemborosan air, dan melakukan pemeliharaan rutin untuk mencegah kebocoran air. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengeluarkan himbauan dan kampanye kepada anggota dan/atau masyarakat untuk melakukan konservasi air, menghindari pemborosan air, dan melakukan pemeliharaan rutin untuk mencegah kebocoran air. • Membantu pemerintah provinsi dalam mengembangkan dan menyebarluaskan kampanye konservasi air yang efektif yang menargetkan berbagai pemangku kepentingan. • Menawarkan keahlian dalam perumusan, penetapan, dan pemantauan kebijakan tentang tindakan konservasi air untuk semua jenis pengguna. • Menggunakan kembali air bekas seperti dari mencuci sayur dan buah, keperluan keagamaan untuk keperluan lain seperti menyiram taman, mencuci mobil, dll



Sumber: Rohan Haidar - Unsplash

Aksi Utama

Teknologi daur ulang air limbah

Indikator

- Setidaknya 1 juta liter air limbah (kategori berat) diolah dan didaur ulang setiap tahun dengan mengadopsi teknologi daur ulang air limbah yang sesuai
- Setidaknya 2 juta liter air limbah kategori ringan (*grey water*) diolah dan didaur ulang setiap tahun dengan mengadopsi teknologi daur ulang air limbah yang sesuai

Aksi yang Dijanjikan (*Pledged Actions*)

Pemerintah Daerah	Kelompok Bisnis dan Pelaku Usaha	Kelompok Masyarakat
<ul style="list-style-type: none"> • Mengalokasikan anggaran bagi perusahaan rintisan (<i>start-up</i>) untuk mengembangkan dan menguji coba teknologi daur ulang air limbah yang terjangkau untuk berbagai jenis bangunan. • Merumuskan dan memberlakukan kebijakan yang mewajibkan penghasil air limbah utama (misalnya industri, <i>real estate</i>, mal, dll.) untuk memasang dan mengoperasikan teknologi pengolahan dan daur ulang air limbah sebagai bagian dari persyaratan untuk operasi bisnis. 	<ul style="list-style-type: none"> • Membangun kemitraan dengan pemerintah dan akademisi untuk mengembangkan teknologi daur ulang air limbah. • Menggunakan teknologi daur ulang air limbah untuk kegiatan kantor dan operasional- 	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan teknologi daur ulang air limbah • Menawarkan layanan konsultasi ahli dan berpartisipasi dalam konsultasi tentang perumusan dan penetapan kebijakan yang mensyaratkan penghasil air limbah utama (misalnya industri, <i>real estate</i>, mal, dll.) untuk memasang dan mengoperasikan teknologi pengolahan dan daur ulang air limbah sebagai bagian dari persyaratan untuk operasi bisnis. • Terlibat aktif dalam kampanye pemanfaatan teknologi daur ulang air limbah sederhana yang disediakan oleh pemerintah atau dari sektor bisnis melalui kemitraan



Sumber: Ivan Bandura - Unsplash

Aksi Utama

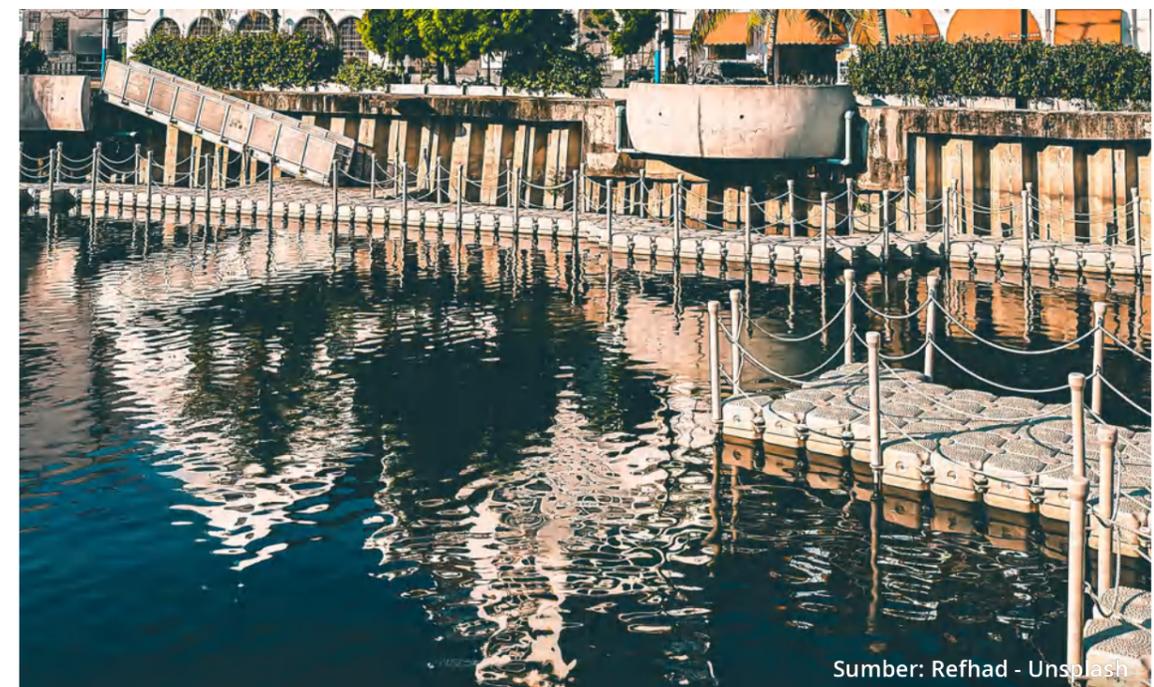
Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) berkelanjutan

Indikator

- Penegakan peraturan pengelolaan DAS dengan melindungi dan melestarikan 6295 hektar DAS Ciliwung

Aksi yang Dijanjikan (*Pledged Actions*)

Pemerintah Daerah	Kelompok Bisnis dan Pelaku Usaha	Kelompok Masyarakat
<ul style="list-style-type: none"> • Naturalisasi/normalisasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung dan Cisadane dengan pemerintah kota dan kabupaten di sekitar Jakarta • Menegakkan hukum terhadap pencemar sungai dan menduduki tepi sungai 	<ul style="list-style-type: none"> • Berpartisipasi aktif dalam gerakan konservasi DAS dan sungai dengan tidak membuang air limbah langsung ke badan air 	<ul style="list-style-type: none"> • Menjaga dan melestarikan sungai dengan tidak membuang sampah dan membuang air limbah ke sungai • Berpartisipasi aktif dalam gerakan konservasi DAS dan sungai • Melaporkan kegiatan pencemaran sungai dan pembangunan di sepanjang bantaran sungai kepada pihak yang berwenang



Sumber: Refhad - Unsplash

Ruang Terbuka Hijau dan Pertanian Perkotaan

Aksi-Aksi Utama

- a. Perluasan area hijau
- b. Penyelamatan hutan bakau (*mangrove*)
- c. Pelestarian keanekaragaman hayati Jakarta
- d. Memanfaatkan lahan tidur untuk ruang hijau produktif
- e. Peningkatan partisipasi pelaku pertanian perkotaan
- f. Pasar pertanian perkotaan
- g. Distribusi bibit untuk pertanian perkotaan

E. Ruang Terbuka Hijau dan Pertanian Perkotaan

Menurut rencana strategis Dinas Kehutanan DKI Jakarta 2018 - 2022, luasan ruang terbuka hijau di DKI Jakarta baru mencapai 4,86% (setara dengan 3.175,22 hektar) dari total luas lahan provinsi. Luasan ini jauh di bawah standar RTH seluas 30% dari total luas lahan yang ditetapkan pemerintah. Tantangan utama penyediaan ruang hijau yang memadai di provinsi ini meliputi ketersediaan lahan yang sangat terbatas dan kompleksitas dalam kepemilikan dan pengelolaan lahan. Oleh karena itu, inovasi dan perubahan paradigma menjadi cikal bakal optimalisasi dan transformasi kawasan perkotaan menjadi ruang hijau produktif. Inisiatif penanaman pohon dan pertanian perkotaan adalah strategi utama yang ingin diadopsi dan dipromosikan oleh DKI Jakarta.

DKI Jakarta terus melaksanakan dan secara agresif memperluas program penanaman pohon dengan membangun kemitraan dengan sektor swasta. Kemitraan ini diharapkan dapat memimpin upaya dalam mengubah lahan kosong dan infrastruktur terbengkalai (misalnya rel kereta api) menjadi ruang hijau yang produktif dan menarik. Selain itu pemerintah juga mendorong pemangku kepentingan untuk menyediakan taman atap, taman vertikal dan sebagainya untuk menambah ruang hijau.

Pertanian perkotaan adalah sebuah inisiatif yang mulai populer di kalangan masyarakat. Dinas Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan DKI Jakarta telah memulai implementasi program pertanian perkotaan seperti Gang Hijau (penghijauan gang-gang kecil), Kebun Bibit (pusat pengembangan benih), Rumah Kaca, Ruang Publik Terpadu Ramah Anak untuk Urban Farming (RPTRA), dan *Demo Plot*²². Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta juga mengkoordinir pelaksanaan Program Kampung Iklim (Proklim) yang mengedepankan pertanian perkotaan sebagai salah satu kegiatan dalam program ini dengan melibatkan masyarakat sebagai aktor utama. Pemerintah provinsi berencana untuk mengembangkan pertanian perkotaan di daerah pemukiman dengan memberikan pelatihan peningkatan kapasitas tentang praktik pertanian di tingkat rumah tangga serta membangun pertanian perkotaan skala komunitas yang menggunakan berbagai bentuk dan strategi seperti berkebun vertikal dan hidroponik. Terlepas dari upaya awal ini, peluang untuk peningkatan tetap lambat dan menantang bagi provinsi ini. Oleh karena itu, beberapa organisasi dan kelompok masyarakat juga turun tangan untuk mengisi kesenjangan dan mempercepat upaya pemerintah dengan melaksanakan proyek pertanian perkotaan mereka sendiri dengan tujuan menjadikan pertanian perkotaan sebagai norma di antara masyarakat di Jakarta.

DKI Jakarta tetap berkomitmen untuk terus melaksanakan inisiatif ini, mengingat berbagai manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pertanian perkotaan yang dilakukan masyarakat menawarkan potensi konsep ulang sistem pangan perkotaan Jakarta dengan membuat makanan bergizi lebih terjangkau dan dapat diakses oleh rumah tangga. Pengelolaan pertanian perkotaan oleh masyarakat juga dapat menghasilkan pekerjaan baru bagi individu yang menganggur dan setengah menganggur. Hal ini juga dapat membangun kohesi sosial yang lebih

²² Desain Besar Pertanian Perkotaan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 - 2030

kuat, menawarkan ruang untuk hobi (terutama untuk orang tua) dan kegiatan sukarela untuk orang muda. Ruang terbuka hijau produktif juga meningkatkan kualitas udara masyarakat. Selain itu, ini juga berpotensi berkontribusi untuk memenuhi target iklim DKI Jakarta dengan meningkatkan penyerapan karbon, memperpendek jarak perjalanan dalam mengangkut dan mendistribusikan produk pertanian, mengalihkan pembuangan sampah organik dengan pengomposan dan menggunakan sebagai pupuk di pertanian perkotaan. Karena banyaknya manfaat tersebut, DKI Jakarta mengupayakan perluasan ruang hijau produktif di seluruh provinsi sebagai bagian dari agenda pembangunan dan aksi iklim.

Strategi: Perluasan RTH produktif di DKI Jakarta

Tujuan : Untuk berkontribusi pada pengurangan emisi GRK dan peningkatan kapasitas penyerapan karbon dengan memperluas ruang hijau produktif melalui penanaman pohon dan pertanian perkotaan



Sumber: Dhyanayu L. Almitra - ICLEI Indonesia

Aksi Utama		
Perluasan area hijau		
Indikator		
<ul style="list-style-type: none"> Sedikitnya terdapat peningkatan ruang hijau seluas 100 hektar pada tahun 2030 	<ul style="list-style-type: none"> Setidaknya terdapat penambahan 2 juta pohon pada tahun 2030 	<ul style="list-style-type: none"> Setidaknya 30% dari total luas lahan didedikasikan untuk pertanian perkotaan pada tahun 2030
Aksi yang Dijanjikan (<i>Pledged Actions</i>)		
Pemerintah Daerah	Kelompok Bisnis dan Pelaku Usaha	Kelompok Masyarakat
<ul style="list-style-type: none"> Merumuskan dan menetapkan kebijakan yang memungkinkan pengarusutamaan ruang hijau yang lebih kuat dalam perencanaan kota di seluruh Jakarta Merumuskan kebijakan yang inklusif dan responsif gender untuk peningkatan area ruang hijau termasuk penambahan beberapa kategori ruang hijau (misal. taman vertikal, dinding hijau, taman, taman atap, jalur hijau) dalam konsep RTH Menyusun panduan penanaman pohon sesuai konsep "menanam pohon yang tepat di tempat yang tepat" untuk memaksimalkan penyerapan emisi. Menetapkan, membangun, dan memelihara kawasan hutan kota di provinsi. Melaksanakan kegiatan penghijauan perkotaan termasuk peningkatan kapasitas dan mobilisasi/keterlibatan masyarakat bekerja sama dengan OMS/LSM, akademisi, dan sektor swasta. Melaksanakan kegiatan penghijauan melalui Gerakan Menanam Jumat (<i>Go JakFarm</i>) di lokasi perkantoran, rumah kaca/gang, RPTRA, sekolah, dan rumah susun Meningkatkan kapasitas perencana kota dan pembuat kebijakan dalam desain dan implementasi penghijauan kota di bidang infrastruktur, kebijakan, dan advokasi melalui pertukaran pembelajaran dengan OMS/LSM, akademisi, dan pemerintah daerah lainnya. 	<ul style="list-style-type: none"> Mengalokasikan ruang hijau (misal. taman vertikal, dinding hijau, taman, taman atap) di gedung dan properti. Mengintegrasikan ruang hijau dan desain dalam konstruksi/pengembangan gedung baru. Menyelaraskan program CSR dengan advokasi penghijauan kota dan kegiatan pemerintah provinsi dengan menawarkan bantuan teknis dan keuangan di bidang infrastruktur dan berpartisipasi aktif dalam upaya advokasi dan mobilisasi/keterlibatan masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> Menawarkan keahlian kepada pemerintah provinsi dalam perumusan, penetapan, dan pemantauan kebijakan yang memungkinkan pengarusutamaan ruang hijau perkotaan yang lebih kuat dalam perencanaan kota di seluruh Jakarta. Menyelenggarakan kegiatan advokasi, dan penanaman pohon bersama anggota serta kegiatan penghijauan di sekitar rumah, sekolah, rumah ibadah, dll Menawarkan pelatihan pengembangan kapasitas kepada anggota, bisnis, dan pemerintah provinsi dalam mengadopsi desain ruang hijau di berbagai jenis bangunan/properti. Membantu pemerintah provinsi dalam memobilisasi anggota masyarakat dalam pemeliharaan ruang terbuka hijau di seluruh provinsi.

Aksi Utama

Penyelamatan hutan bakau (*mangrove*)

Indikator

- Setidaknya terdapat peningkatan tutupan tajuk bakau (*mangrove*) sebesar 20% pada tahun 2030
- Setidaknya 5 kawasan konservasi bakau (*mangrove*) percontohan dibangun

Aksi yang Dijanjikan (*Pledged Actions*)

Pemerintah Daerah	Kelompok Bisnis dan Pelaku Usaha	Kelompok Masyarakat
<ul style="list-style-type: none"> • Menyelenggarakan wisata edukasi di kawasan perlindungan bakau (<i>mangrove</i>). • Menyelenggarakan kegiatan penanaman bakau (<i>mangrove</i>) bersama OMS/LSM, sekolah, dan swasta. 	<ul style="list-style-type: none"> • Menyelaraskan program CSR dengan program pelestarian kawasan bakau (<i>mangrove</i>) dari pemerintah provinsi. • Menyelenggarakan kegiatan penanaman bakau (<i>mangrove</i>) antar pegawai bekerja sama dengan pemerintah provinsi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Menyelenggarakan kegiatan penanaman pohon bakau antar anggota bekerjasama dengan pemerintah provinsi. • Menyelenggarakan wisata edukasi di kawasan perlindungan bakau (<i>mangrove</i>) bersama dengan pemerintah provinsi. • Membantu pemerintah provinsi dalam memantau kawasan perlindungan bakau (<i>mangrove</i>).



Sumber: Dhyanyu L. Almitra - ICLEI Indonesia

Aksi Utama

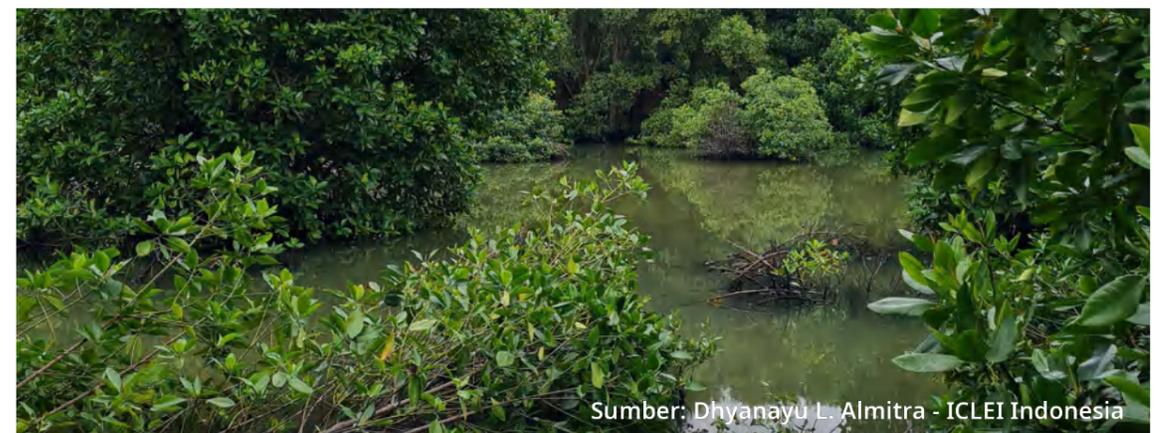
Pelestarian keanekaragaman hayati Jakarta

Indikator

- Keanekaragaman hayati yang ada di DKI Jakarta saat ini tetap lestari dan tidak punah

Aksi yang Dijanjikan (*Pledged Actions*)

Pemerintah Daerah	Kelompok Bisnis dan Pelaku Usaha	Kelompok Masyarakat
<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan profil kawasan, penilaian flora dan fauna dan penilaian jasa ekosistem, secara partisipatif dan inklusif bekerjasama dengan pemangku kepentingan terkait • Mempublikasikan laporan berkala tentang keadaan keanekaragaman hayati lokal di Jakarta. • Mengembangkan dan menyebarluaskan materi komunikasi, informasi dan edukasi tentang perlindungan dan konservasi keanekaragaman hayati untuk semua pemangku kepentingan. • Melaksanakan program dan proyek yang memungkinkan pengelolaan keanekaragaman hayati terintegrasi dengan peluang pemberdayaan masyarakat bekerjasama dengan pemangku kepentingan terkait. 	<ul style="list-style-type: none"> • Memastikan bahwa proyek pembangunan sesuai dengan kebijakan dan rencana tata guna lahan dan zonasi provinsi serta tidak menimbulkan dampak merugikan (disengaja dan tidak diinginkan) terhadap keanekaragaman hayati lokal. • Menyelaraskan program CSR untuk memungkinkan penawaran dukungan teknis dan keuangan untuk program pengelolaan keanekaragaman hayati dari pemerintah provinsi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Menawarkan jasa penasihat ahli dalam melakukan profil kawasan, penilaian flora dan fauna, dan penilaian jasa ekosistem. • Menawarkan pengetahuan lokal dan berpartisipasi dalam pelaksanaan penilaian serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program dan proyek pengelolaan keanekaragaman hayati. • Membantu pemerintah provinsi dalam advokasi dan kampanye pendidikan tentang langkah-langkah pengelolaan keanekaragaman hayati di antara anggota.



Sumber: Dhyanyu L. Almitra - ICLEI Indonesia

Aksi Utama

Memanfaatkan lahan tidur untuk ruang hijau produktif

Indikator

- Setidaknya 30% dari lahan tidur/kosong digunakan untuk pertanian perkotaan dan ruang hijau

Aksi yang Dijanjikan (*Pledged Actions*)

Pemerintah Daerah	Kelompok Bisnis dan Pelaku Usaha	Kelompok Masyarakat
<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun inventarisasi lahan tidur milik publik dan pribadi yang yang dapat dimanfaatkan menjadi ruang hijau produktif dan mempublikasikannya kepada publik • Membuat kesepakatan kerangka kerja antara pemerintah provinsi dan pemilik lahan swasta dalam mengubah dan memanfaatkannya menjadi ruang hijau yang produktif 	<ul style="list-style-type: none"> • Memanfaatkan lahan tidur terlantar menjadi ruang hijau produktif bekerja sama dengan OMS/LSM dan komunitas lingkungan di bawah kerangka kesepakatan yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Menawarkan keahlian kepada pemerintah provinsi dalam mengembangkan inventarisasi lahan kosong milik publik dan swasta. • Menawarkan pelatihan pengembangan kapasitas kepada anggota, pelaku bisnis, dan pemerintah provinsi dalam mengadopsi desain untuk mengubah lahan kosong menjadi ruang hijau produktif.



Sumber: Dhyanyu L. Almitra - ICLEI Indonesia

Aksi Utama

Peningkatan partisipasi pelaku pertanian perkotaan

Indikator

- Setidaknya terdapat 1000 orang yang terlibat dalam kegiatan pertanian perkotaan perkotaan

Aksi yang Dijanjikan (*Pledged Actions*)

Pemerintah Daerah	Kelompok Bisnis dan Pelaku Usaha	Kelompok Masyarakat
<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pelatihan teknis dan manajemen mengenai pertanian perkotaan bagi warga • Melakukan konsultasi dan pendampingan secara berkala kepada petani perkotaan • Mempromosikan kisah sukses petani perkotaan melalui media • Memperkenalkan praktik pertanian perkotaan kepada anak-anak dan remaja • Membangun kemitraan dengan sektor swasta, OMS, universitas, dan lembaga keuangan dalam pemanfaatan fasilitas umum untuk pertanian perkotaan • Menyelenggarakan acara atau kompetisi pertanian perkotaan dari tingkat kelurahan hingga provinsi 	<ul style="list-style-type: none"> • Menyelaraskan program CSR untuk mendukung implementasi pertanian perkotaan dengan menyelenggarakan pelatihan peningkatan kapasitas bagi pelaku pertanian perkotaan • Mengembangkan usaha sosial dan koperasi pertanian perkotaan • Menawarkan keahlian kepada pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan kompetisi pertanian perkotaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Berpartisipasi aktif dalam kegiatan pertanian perkotaan mulai dari proses budidaya hingga pemasaran • Menawarkan pelatihan peningkatan kapasitas kepada anggota dalam mempraktikkan pertanian perkotaan menggunakan beberapa teknik seperti hidroponik, vertikultur, dll • Melakukan kegiatan pertanian perkotaan di daerah perumahan, sekolah, tempat ibadah • Berpartisipasi aktif dalam pemetaan wilayah pertanian perkotaan



Sumber: Adian Sudiana

Aksi Utama

Pasar pertanian perkotaan

Indikator

- Tersedianya 1 pusat informasi resmi dan pasar produk pertanian perkotaan
- Setidaknya 50% minimarket telah bermitra dengan petani perkotaan untuk menjual produk mereka
- Setidaknya terdapat 5 lokasi untuk festival pasar pertanian perkotaan

Aksi yang Dijanjikan (*Pledged Actions*)

Pemerintah Daerah	Kelompok Bisnis dan Pelaku Usaha	Kelompok Masyarakat
<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan portal/platform berbasis teknologi digital untuk memasarkan produk pertanian perkotaan • Mengembangkan dan mengoperasikan sistem pasar pertanian perkotaan yang menghubungkan langsung antara konsumen dan produsen • Memfasilitasi akses bagi petani perkotaan untuk bermitra dengan minimarket di Jakarta. • Menyelenggarakan "Jakarta Urban Farming Market Festival" • Memantau kualitas produk pertanian perkotaan dengan memberikan bimbingan kepada petani perkotaan dan menguji produk pertanian perkotaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Menawarkan keahlian kepada pemerintah provinsi dalam pengembangan portal/platform berbasis teknologi digital untuk memasarkan produk pertanian perkotaan • Membangun kemitraan dengan pelaku pertanian perkotaan dan pemerintah untuk memasarkan produk pertanian perkotaan • Berpartisipasi dalam festival pasar pertanian perkotaan Jakarta. 	<ul style="list-style-type: none"> • Menawarkan keahlian kepada pemerintah provinsi dalam pengembangan portal/platform berbasis teknologi digital untuk memasarkan produk pertanian perkotaan • Menjual dan membeli produk pertanian perkotaan melalui sistem <i>online</i> dan/atau sistem <i>offline</i> (tetangga dan komunitas terdekat) dengan mengutamakan kegiatan jual beli yang ramah lingkungan seperti tidak menggunakan kemasan plastik sekali pakai • Berpartisipasi aktif dalam komunitas pertanian perkotaan dengan menjual dan membeli tanaman di antara mereka dan berbagi informasi • Berpartisipasi dalam festival pasar pertanian perkotaan Jakarta.



Sumber: Soo Ann Woon - Unsplash

Aksi Utama

Distribusi bibit untuk pertanian perkotaan

Indikator

- Setidaknya 10.000 bibit tanaman, pohon, dan sayuran didistribusikan kepada petani perkotaan di Jakarta setiap tahun

Aksi yang Dijanjikan (*Pledged Actions*)

Pemerintah Daerah	Kelompok Bisnis dan Pelaku Usaha	Kelompok Masyarakat
<ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan dan membagikan bibit kepada petani perkotaan di Jakarta melalui DKPKP 	<ul style="list-style-type: none"> • Menyelaraskan program CSR dalam R&D produksi tanaman tahan iklim 	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan R&D terkait produksi tanaman tahan iklim • Menawarkan keahlian kepada pemerintah provinsi untuk memprioritaskan pengadaan dan distribusi bibit tanaman tahan iklim • Melakukan pelatihan peningkatan kapasitas bagi petani tentang praktik pertanian yang adaptif terhadap perubahan iklim.



Sumber: Adian Sudiana

Kesehatan dan Pengurangan dan Manajemen Risiko Bencana (DRRM)

Aksi-Aksi Utama

- a. Kerja bakti dan gotong royong
- b. Peningkatan kapasitas untuk penanggulangan bencana
- c. Menjaga kesehatan lingkungan dari penyakit terkait perubahan iklim
- d. Memperbaharui peta bencana
- e. Platform informasi bencana
- f. Standar Operasional Prosedur (SOP) bencana

F. Kesehatan dan Pengurangan dan Manajemen Risiko Bencana (DRRM)

Banjir merupakan bencana utama yang sering terjadi di Jakarta. Sistem drainase yang buruk dan kurangnya area resapan berkontribusi pada kejadian banjir ini. Selain itu, 40% wilayah Jakarta dianggap sebagai daerah dataran rendah yang berisiko mengalami percepatan penurunan muka tanah akibat pengambilan air tanah. Daerah yang terkena dampak dan masyarakat dengan fasilitas sanitasi yang tidak memadai lebih rentan terkena penyakit seperti leptospirosis dan demam berdarah. Efek perubahan iklim seperti peningkatan kekuatan dan intensitas angin topan serta kenaikan permukaan laut menempatkan 10 juta populasi Jakarta pada risiko tinggi.

Pada tahun 2018 DKI Jakarta meluncurkan Jakarta Satu, peta *online* terintegrasi (*open access*) yang memberikan informasi risiko banjir di provinsi tersebut. Hal ini memungkinkan pemerintah dan warga untuk lebih siap tidak hanya dalam menanggapi peristiwa banjir tetapi juga dalam menginformasikan arah perencanaan daerah sehingga mencegah hilangnya harta benda dan nyawa. Menyadari pentingnya langkah-langkah ini, pemerintah provinsi terus meningkatkan sistem peringatan dini (*Early Warning System*) kebencanaan dengan mengoptimalkan pengelolaan data dan informasi dalam penanggulangan bencana. Pemerintah juga terus menyempurnakan peta bencana dan standar operasional prosedur dengan melibatkan masyarakat dalam prosesnya. Anggota masyarakat mengambil bagian dalam pemetaan untuk mengidentifikasi dan memvalidasi bahaya yang mereka alami dan bagaimana ini berubah dari waktu ke waktu. Kegiatan ini diperlukan untuk memastikan keakuratan peta bahaya yang dimodelkan. Pemerintah provinsi juga mengintensifkan langkah-langkah infrastruktur untuk perlindungan dan pengendalian banjir dengan memperbaiki sistem sungai, pintu air, waduk, dan naturalisasi sungai. Sementara beberapa proyek infrastruktur sudah berjalan, membangun kapasitas masyarakat yang terkena dampak dan rentan dalam menanggapi bencana dan beradaptasi dengan perubahan iklim sama pentingnya tetapi masih lemah dalam praktiknya. Oleh karena itu, Ikhtiar Jakarta memfokuskan aksi yang dijanjikan pada langkah-langkah tersebut untuk melengkapi proyek infrastruktur yang sedang dan akan dibangun. Terakhir, pemerintah provinsi juga mendorong warganya untuk berpartisipasi aktif dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat di lingkungan masing-masing.

Strategi :	Membangun lingkungan yang berketahanan (<i>resilient</i>) dan sehat untuk semua orang
Tujuan :	Meningkatkan kapasitas adaptif warga terhadap bencana terkait perubahan iklim dengan memperkuat tindakan pencegahan

Aksi Utama

Kerja bakti dan gotong royong

Indikator

- Terlaksananya kegiatan kerja bakti dan gotong royong untuk membersihkan lingkungan secara rutin setiap hari Jumat atau Sabtu di semua kecamatan

Aksi yang Dijanjikan (*Pledged Actions*)

Pemerintah Daerah	Kelompok Bisnis dan Pelaku Usaha	Kelompok Masyarakat
<ul style="list-style-type: none"> • Memobilisasi kembali peran penting RT dan RW dalam kerja bakti dan gotong royong untuk membersihkan lingkungan di kawasan pemukiman. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengorganisir kelompok relawan untuk kegiatan kerja bakti dan gotong royong untuk membersihkan lingkungan bersama masyarakat di sekitar perusahaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Menyelenggarakan kegiatan kerja bakti dan gotong royong untuk membersihkan lingkungan bersama anggota di lingkungan pemukiman, sekolah, dan rumah ibadah. • Bergabung dengan organisasi di tingkat RT dan RW dalam membangun semangat gotong royong.



Aksi Utama

Peningkatan kapasitas untuk penanggulangan bencana

Indikator

- Semua masyarakat di daerah rawan bencana (permukiman, sekolah, rumah ibadah, dll) dilatih tanggap bencana
- Terdapat 150 sekolah aman bencana pada tahun 2030

Aksi yang Dijanjikan (*Pledged Actions*)

Pemerintah Daerah	Kelompok Bisnis dan Pelaku Usaha	Kelompok Masyarakat
<ul style="list-style-type: none"> • Secara teratur menyelenggarakan latihan dan simulasi bekerja sama dengan pengurus RT dan RW untuk meningkatkan kapasitas anggota masyarakat dalam tanggap bencana. • Menyebarkan informasi tepat waktu secara berkala melalui berbagai platform (misalnya poster, brigade teks, televisi, radio, dll.) tentang antisipasi bencana, protokol tanggap dan evakuasi bencana kepada masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Secara teratur menyelenggarakan latihan dan simulasi bekerjasama dengan pemerintah provinsi untuk membangun kapasitas pegawai dalam tanggap bencana. • Menyelenggarakan gerakan sukarelawan dan donasi di antara karyawan untuk membantu komunitas yang terkena dampak dan pengungsi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Secara teratur menyelenggarakan latihan dan simulasi bekerjasama dengan pemerintah provinsi untuk membangun kapasitas anggota dalam tanggap bencana. • Membantu pemerintah provinsi serta pengurus RT dan RW dalam sosialisasi antisipasi bencana, protokol tanggap dan evakuasi bencana kepada masyarakat. • Menyelenggarakan gerakan sukarela dan donasi di antara anggota untuk membantu komunitas yang terkena dampak dan pengungsi.



Aksi Utama

Menjaga kesehatan lingkungan dari penyakit terkait perubahan iklim

Indikator

- Setidaknya 5 proyek untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dari penyakit terkait perubahan iklim telah dilaksanakan dengan dukungan pendanaan dari dana keagamaan dan sosial pada tahun 2030
- Sedikitnya 1.000 relawan dimobilisasi untuk melakukan kampanye dan kegiatan peningkatan kapasitas di daerah rawan bencana

Aksi yang Dijanjikan (*Pledged Actions*)

Pemerintah Daerah	Kelompok Bisnis dan Pelaku Usaha	Kelompok Masyarakat
<ul style="list-style-type: none"> • Memfasilitasi akses dan pemanfaatan dana keagamaan dan sosial untuk kegiatan kesehatan lingkungan • Memaksimalkan ruang interaksi publik untuk kampanye menjaga kesehatan lingkungan seperti pada saat <i>Car Free Day</i> dan lain-lain • Menyusun materi untuk kampanye <i>online</i> dan <i>offline</i> tentang menjaga kesehatan lingkungan • Menyelenggarakan kampanye gerakan masyarakat untuk hidup sehat (Germas) 	<ul style="list-style-type: none"> • Berpartisipasi aktif dalam kampanye dan gerakan menjaga kesehatan lingkungan bersama-sama dengan masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Berpartisipasi aktif dalam kampanye dan gerakan menjaga kesehatan lingkungan di lingkungan sekitar, sekolah dan rumah ibadah • Memantau penggunaan dana keagamaan dan sosial dalam pelaksanaan proyek-proyek yang berkaitan dengan kesehatan lingkungan • Berpartisipasi dalam pemeliharaan fasilitas yang dibangun dengan dana keagamaan dan sosial

Aksi Utama

Memperbaharui peta bencana

Indikator

- Peta bahaya yang komprehensif dan terbaru telah dibuat dan disebarluaskan
- Semua kelompok pemangku kepentingan yang relevan telah berpartisipasi dalam pembuatan, validasi, dan penyebaran peta bahaya

Aksi yang Dijanjikan (*Pledged Actions*)

Pemerintah Daerah	Kelompok Bisnis dan Pelaku Usaha	Kelompok Masyarakat
<ul style="list-style-type: none"> • Membuat peta bencana melalui proses partisipatif dan inklusif bekerja sama dengan akademisi, pemerintah pusat dan masyarakat. • Menyelenggarakan sosialisasi untuk menyebarkan peta bencana 	<ul style="list-style-type: none"> • Menawarkan keahlian dalam konsultasi, data, dan sumber daya kepada pemerintah provinsi dalam penyusunan peta bencana perkotaan yang partisipatif dan inklusif. 	<ul style="list-style-type: none"> • Menawarkan keahlian dalam konsultasi, data, dan sumber daya kepada pemerintah provinsi proses pembuatan dan validasi peta bencana perkotaan yang partisipatif dan inklusif. • Terlibat aktif dalam penyebaran peta bencana



Aksi Utama		
Platform informasi bencana		
Indikator		
<ul style="list-style-type: none"> • 1 platform informasi DRRM berbasis web dan/atau aplikasi yang terintegrasi dikembangkan 		
Aksi yang Dijanjikan (<i>Pledged Actions</i>)		
Pemerintah Daerah	Kelompok Bisnis dan Pelaku Usaha	Kelompok Masyarakat
<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan platform informasi bencana yang terintegrasi dan mencakup seluruh bencana di Jakarta bekerja sama dengan akademisi dan bisnis dan industri. • Pemutakhiran data pada database <i>Jakarta Smart City</i> atau database portal melalui pengembangan data informasi yang responsif gender. 	<ul style="list-style-type: none"> • Menawarkan keahlian kepada pemerintah provinsi dalam pengembangan platform informasi kebencanaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Menawarkan keahlian kepada pemerintah provinsi dalam pendataan daerah rawan bencana. • Menawarkan keahlian kepada pemerintah provinsi dalam pelaporan kejadian bencana ke dalam platform informasi



Sumber: Sabda Rhamadhoni - Unsplash

Aksi Utama		
Standar Operasional Prosedur (SOP) bencana		
Indikator		
<ul style="list-style-type: none"> • Semua instansi pemerintah (provinsi hingga kelurahan), sekolah, dan dunia usaha sudah menyiapkan SOP kebencanaan 		
Aksi yang Dijanjikan (<i>Pledged Actions</i>)		
Pemerintah Daerah	Kelompok Bisnis dan Pelaku Usaha	Kelompok Masyarakat
<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun dan menyebarluaskan SOP bencana melalui proses partisipatif, inklusif dan responsif gender (termasuk masyarakat pesisir) • Menyusun dokumen perencanaan kontinjensi bencana untuk semua potensi bencana dan melakukan evaluasi secara berkala. • Memberikan pedoman umum bagi warga dalam menghadapi bencana (banjir, gempa bumi, kebakaran, dll) 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan SOP bencana di area kantor dan operasional • Menyediakan peralatan standar untuk mengurangi risiko dampak bencana di area perkantoran dan kegiatan bisnis 	<ul style="list-style-type: none"> • Menawarkan keahlian dalam penyusunan SOP bencana melalui proses partisipatif, inklusif dan responsif gender (termasuk masyarakat pesisir) • Menawarkan keahlian dalam penyusunan dokumen perencanaan kontinjensi bencana • Berpartisipasi aktif dalam konsultasi, workshop dan sosialisasi SOP kebencanaan • Menggunakan budaya lokal sebagai media penyampaian SOP kesiapsiagaan bencana di lingkungan sekitar.



Sumber: ICLEI Indonesia

Pembiayaan Ikhtiar Jakarta

DKI Jakarta mengalokasikan anggaran tahunan yang tersebar di sekitar 14 dinas (SKPD) untuk membiayai pelaksanaan program dan proyek perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan yang diharapkan juga untuk membiayai pelaksanaan Ikhtiar Jakarta. Namun, diperkirakan anggaran tahunan pemerintah provinsi tidak akan cukup untuk implementasi penuh. Oleh karena itu, DKI Jakarta menghimbau kepada mitranya -OMS/LSM, lembaga pembiayaan, swasta - untuk bersama-sama mengimplementasikan Ikhtiar Jakarta melalui berbagai instrumen seperti pembiayaan bersama (misalnya pinjaman, hibah), bantuan teknis, pembangunan infrastruktur, penelitian, advokasi dan pembangunan kapasitas. Uraian rinci tentang peluang pengaturan pembiayaan bersama akan ditentukan dan dikomunikasikan dalam pertemuan rutin Tim Kerja Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim di bawah koordinasi Badan Lingkungan Hidup (DLH) sebagai ketua harian dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sebagai ketua.

Tabel 3. Potensi sumber pembiayaan implementasi Ikhtiar Jakarta

NO.	Sektor	Strategi	Pemerintah Daerah	Institusi Pembiayaan dalam negeri dan/atau luar negeri	Partner Pembangunan	Sektor Swasta
1	Energi dan Bangunan Hijau	Mendorong energi efisiensi, konservasi energi dan energi terbarukan	✓	✓	✓	✓
2	Transportasi dan Kualitas Udara	Pergeseran moda dari penggunaan kendaraan pribadi menjadi penggunaan transportasi umum dan mobilitas aktif	✓	✓	✓	✓
3	Limbah Padat (sampah)	Pengurangan dan pengelolaan limbah padat dari sumbernya	✓	✓	✓	✓
4	Air	Meningkatkan akses pelayanan terhadap air bersih yang aman dan pengelolaan limbah cair	✓	✓	✓	
5	Ruang Terbuka Hijau dan Pertanian Perkotaan	Perluasan ruang terbuka hijau produktif di DKI Jakarta	✓		✓	
6	Kesehatan dan Pengurangan dan Manajemen Risiko Bencana (DRRM)	Membangun lingkungan yang berketahanan dan sehat untuk semua orang	✓		✓	

Pengukuran, Pelaporan dan Verifikasi (MRV)

Sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur No 96 Tahun 2020, Tim Kerja Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim dibentuk untuk mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan adaptasi dan mitigasi serta melakukan monitoring dan evaluasi yang dipimpin oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) selaku ketua dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) selaku ketua harian. Tim kerja bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan dan pemantauan *milestone* Ikhtiar Jakarta. BAPPEDA dan DLH dibantu oleh dinas dan instansi terkait lainnya. Tabel berikut menjelaskan peran dan tanggung jawab masing-masing dinas dan kelompok pemangku kepentingan serta garis besar strategi khusus yang harus dilakukan oleh setiap dinas dan kelompok pemangku kepentingan.

Tabel 4. Peran dan tanggung jawab berbagai pemangku kepentingan dalam implementasi Ikhtiar Jakarta

BAPPEDA	DLH
Mengkoordinasikan rencana aksi dan anggaran terkait pelaksanaan Ikhtiar Jakarta	Mengkoordinasikan pelaksanaan dan pemantauan Ikhtiar Jakarta antar instansi terkait
Diskominfotik	
Berkoordinasi dengan instansi lain untuk menyebarluaskan informasi dan kampanye yang informatif dan faktual terkait aksi Ikhtiar Jakarta kepada publik Berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup tentang langkah-langkah efektif untuk memobilisasi aksi warga untuk perubahan iklim	Melakukan dan melaporkan emisi GRK Jakarta secara berkala, kontribusi pengurangan emisi GRK dari aksi Ikhtiar Jakarta yang berhasil dilaksanakan ke platform nasional yang ada (yaitu SIGN SMART, SRN dan AKSARA) dan platform pelaporan independen global (misalnya <i>CDP-ICLEI Unified Reporting System</i>)
DTKE, Dishub, DSDA, Distamhut, DKPKP, BPBD, Dinkes, Disdik DPPAP, DCKTRP, DPRKP, DBM	
Melaksanakan aksi dan komitmen yang tertera di aksi yang dijanjikan di Ikhtiar Jakarta sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya Mengkoordinir, memfasilitasi dan mengawasi pelaksanaan aksi serta menggerakkan kelompok masyarakat dalam melaksanakan aksi di Ikhtiar Jakarta sesuai amanatnya Berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk menyediakan data dan informasi yang tepat waktu tentang status pelaksanaan aksi serta kemungkinan penyesuaian target dan pendekatan pelaksanaan Ikhtiar Jakarta Membantu Dinas Lingkungan Hidup dalam upaya advokasi dan program pendidikan yang akan memerintahkan pemangku kepentingan terkait dalam tindakan kolaboratif untuk aksi iklim.	

Aparatur Kecamatan dan Kelurahan

Mengkoordinir, memfasilitasi dan mengawasi pelaksanaan aksi di wilayahnya serta menggerakkan masyarakat dalam melaksanakan aksi di Ikhtiar Jakarta bekerjasama dengan instansi pemerintah daerah terkait

Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) / Lembaga Swadaya Masyarakat (NGO)

Membantu dan menggerakkan masyarakat dalam melaksanakan aksi di Ikhtiar Jakarta bekerjasama dengan instansi pemerintah daerah terkait.

Membantu DKI Jakarta dalam implementasi Ikhtiar Jakarta yang efektif dengan menawarkan layanan penasihat ahli dan melakukan tinjauan independen dan rekomendasi untuk tindakan yang akan meningkatkan ambisi iklim Jakarta.

Sektor swasta / pelaku usaha

Melaksanakan aksi di Ikhtiar Jakarta sesuai kewenangannya dan memberikan fasilitas pendukung berkoordinasi dengan instansi pemerintah daerah terkait

Tabel 5. SKPD pelaksana berdasarkan strategi prioritas Ikhtiar Jakarta

No	Sektor	Strategi	SKPD Pelaksana
1	Energi dan Bangunan Hijau	Mendorong energi efisiensi, konservasi energi dan energi terbarukan	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (DTKTE) Dinas Pendidikan (Disdik) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfo)
2	Transportasi dan Kualitas Udara	Pergeseran moda dari penggunaan kendaraan pribadi menjadi penggunaan transportasi umum dan mobilitas aktif	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Perhubungan (Dishub) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Dinas Bina Marga (DBM) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfo)
3	Limbah Padat (sampah)	Pengurangan dan pengelolaan limbah padat dari sumbernya	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfo)

4	Air	Meningkatkan akses pelayanan terhadap air bersih yang aman dan pengelolaan limbah cair	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Sumber Daya Air (DSDA) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfo)
5	Ruang Terbuka Hijau dan Pertanian Perkotaan	Perluasan ruang terbuka hijau produktif di DKI Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut) Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (DKPKP) Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfo)
6	Kesehatan dan Pengurangan dan Manajemen Risiko Bencana (DRRM)	Membangun lingkungan yang berketahanan dan sehat untuk semua orang	<ul style="list-style-type: none"> Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dinas Kesehatan (Dinkes) Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (DCKTRP) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfo)

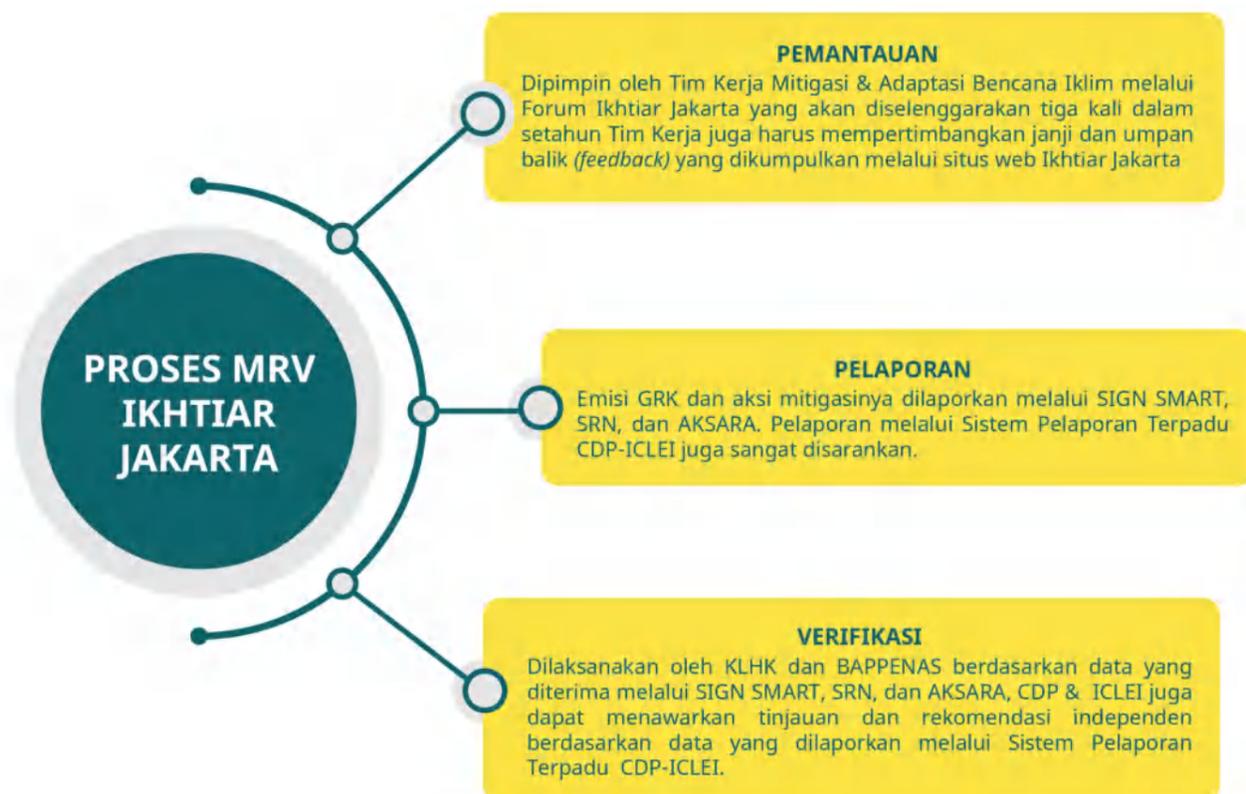
Forum Ikhtiar Jakarta akan diadakan tiga kali setahun untuk mengumpulkan semua pemangku kepentingan terkait. Forum ini akan menjadi wadah bagi DKI Jakarta untuk melaporkan proses dan pencapaian implementasi, serta untuk terus meminta masukan, saran, dan komitmen dari berbagai pemangku kepentingan untuk mempercepat mekanisme implementasi secara efektif. Selain itu, warga juga dapat terus mengomunikasikan janji aksi iklim individu mereka serta umpan balik (*feedback*) dan rekomendasi untuk implementasi Ikhtiar Jakarta yang efektif melalui situs Ikhtiar Jakarta²³, platform pelibatan pemangku kepentingan *online* yang berfungsi untuk mendidik dan menginformasikan kepada publik tentang berbagai aksi iklim yang mereka lakukan. dapat dilakukan untuk mendukung upaya penurunan kontribusi emisi GRK provinsi. Janji dan umpan balik (*feedback*) yang dikumpulkan melalui platform *online* maupun diskusi Forum Ikhtiar Jakarta akan dianalisis dan digunakan untuk menginformasikan arah masa depan Ikhtiar Jakarta.

Tim kerja juga akan mengawasi pelaporan berkala inventarisasi emisi GRK tahunan DKI Jakarta kepada SIGN SMART²⁴. Kemajuan pelaksanaan aksi mitigasi dan adaptasi yang tergabung dalam RAD-GRK, Strategi Jangka Panjang Mewujudkan Pembangunan Rendah Karbon DKI Jakarta 2050, Ikhtiar Jakarta, dan dokumen perencanaan terkait lainnya (serta intervensi mandiri) dilaporkan ke Sistem Registri

²³ <https://lingkunganhidup.jakarta.go.id/ikhtiarjakarta/en>

²⁴ <http://signsmart.menlhk.go.id/v2.1/app/>

Nasional (SRN)²⁵ dan Aplikasi Perencanaan dan Pemantauan Pembangunan Rendah Karbon (AKSARA)²⁶. Ini adalah platform pelaporan yang dibentuk oleh pemerintah pusat yang memungkinkan pemerintah daerah untuk melaporkan kontribusi aksi iklim mereka dalam pencapaian target NDC. DKI Jakarta juga akan terus melaporkan kemajuannya dalam menyampaikan Ikhtiar Jakarta ke Sistem Pelaporan Terpadu CDP-ICLEI (*CDP-ICLEI Unified Reporting System*) sebagai bagian dari komitmennya terhadap GCoM.



Gambar 7. Skema pemantauan, pelaporan dan verifikasi (MRV) Ikhtiar Jakarta



Sumber: Eko Herwantoro - Unsplash

²⁵ <http://srn.menlhk.go.id/>

²⁶ <https://pprk.bappenas.go.id/aksara/>

Lampiran

Pemangku Kepentingan yang Terlibat

Berikut merupakan daftar pemangku kepentingan yang terlibat selama proses penyusunan Dokumen Ikhtiar Jakarta

A. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

1. Kedeputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
2. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
6. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta
7. Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
8. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
9. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
10. Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
11. Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta
12. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
13. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
14. Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
15. Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
16. Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
17. Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
18. Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta
19. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta
20. Dewan Riset Daerah DKI Jakarta

B. Komunitas Kampung Iklim

1. Komunitas Kampung Iklim Kotamadya Jakarta Pusat
 - a. RW 01 Kel. Sunter Jaya - Bapak RB Sutarno
 - b. RW 3 Kel. Kelapa Gading Timur: Bapak Budi Winarko
 - c. RW 05 Kel Rawa Badak Selatan: Bapak Rahmad Djoenaedi
2. Komunitas Kampung Iklim Kotamadya Jakarta Utara
 - a. RW 01 Kel. Sunter Jaya - Bapak RB Sutarno
 - b. RW 3 Kel. Kelapa Gading Timur: Bapak Budi Winarko

- c. RW 05 Kel Rawa Badak Selatan: Bapak Rahmad Djoenaedi
- 3. Komunitas Kampung Iklim Kotamadya Jakarta Timur
 - a. RW 04 Kel. Ciracas
 - b. RW 03 Malaka Sari
- 4. Komunitas Kampung Iklim Kotamadya Jakarta Selatan
 - a. RW 07 Kebayoran Lama Selatan
 - b. RW 08 Petukangan Selatan
- 5. Komunitas Kampung Iklim Kotamadya Jakarta Barat
 - a. RW 08 Duri Kosambi
 - b. RW 06 Meruya Utara
- C. Komunitas Bank Sampah**
- 1. Komunitas Bank Sampah Kotamadya Jakarta Pusat
 - a. Bank Sampah Hijau Selaras Mandiri, RW 06 Kebon Kosong Kemayoran
 - b. Bank Sampah Dahlia, Jln Kebanggaan RT. 002/08 Cempaka Putih Barat
- 2. Komunitas Bank Sampah Kotamadya Jakarta Timur
 - a. Bank Sampah SEMESTA, Jl. Balai Pustaka IV, Gereja Kel. Kudus, Rawamangun
 - b. Bank Sampah Harapan Ibu, Jl. Cibubur IV No. 57 RT 04 RW 02 Cibubur Kec. Ciracas
- 3. Komunitas Bank Sampah Kotamadya Jakarta Selatan
 - a. Bank Sampah Rawajati: Ibu Ninik
 - b. Bank Sampah Mekar Sari Mampang: Ibu Djuraidah
- 4. Komunitas Bank Sampah Kotamadya Jakarta Barat
 - a. Bank Sampah Mawar, Perumahan Dinas LH Bambu Larangan
 - b. Bank Sampah Anggrek, Perumahan Dinas LH Tegal Alur
- 5. Komunitas Bank Sampah Kotamadya Jakarta Utara
 - a. Bank Sampah Karya Peduli RW 09 Kel. Semper Barat: Bapak Nanang Suwardi
 - b. Bank Sampah Delima RW 06 Kel. Kelapa Gading Timur: Ibu Gadis Valleria
- D. Forum Masyarakat Peduli Lingkungan (FORMAPEL)**
- 1. FORMAPEL Jakarta Barat
- 2. FORMAPEL Jakarta Pusat
- 3. FORMAPEL Jakarta Selatan
- 4. FORMAPEL Jakarta Timur
- 5. FORMAPEL Jakarta Utara
- 6. FORMAPEL Kepulauan Seribu

- E. Perwakilan SAMTAMA DKI Jakarta**
- 1. RW 03 Cempaka Putih Timur – Bapak Adian
- 2. RW 02 Pondok Bambu – Bapak Edi
- F. Sekolah**
- Sekolah Dasar (SD)**
- 1. SD N 01 Menteng Jakarta Pusat
- 2. SD N 11 Pegadungan Jakarta Pusat
- 3. SD N 01 Kebon Jeruk Jakarta Barat
- 4. SD N 04 Lebak Bulus Jakarta Selatan
- 5. SD N 01 Kelapa Dua Wetan Jakarta Timur
- 6. SD N 03 Cijantung Jakarta Timur
- 7. SD N 02 Wijaya Kusuma Jakarta Barat
- 8. SD N 03 Kapuk Muara Jakarta Utara
- Sekolah Menengah Pertama (SMP)**
- 1. SMP N 181 Jakarta Pusat 1
- 2. SMP N 276 Jakarta Selatan 1
- 3. SMP N 240 Jakarta Selatan 2
- 4. SMP N 100 Jakarta Barat 1
- 5. SMP N 75 Jakarta Barat 2
- 6. SMP N 07 Jakarta Timur 1
- 7. SMP N 203 Jakarta Timur 2
- 8. SMP N 121 Jakarta Utara
- Sekolah Menengah Atas/Kejuruan (SMA/SMK)**
- 1. SMA N 01 Jakarta Pusat
- 2. SMA N 65 Jakarta Barat
- 3. SMA N 95 Jakarta Barat
- 4. SMA N 11 Jakarta Timur
- 5. SMK N 2 Jakarta, Jakarta Pusat
- 6. SMK N 57 Jakarta, Jakarta Selatan
- 7. SMK N 27 Jakarta, Jakarta Pusat
- 8. SMK N 63 Jakarta, Jakarta Selatan
- G. Asosiasi/ Perkumpulan/ Komunitas**
- 1. Akademi Kompos
- 2. Asosiasi Atap Surya (AAS)

3. Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia (ADUPI)
4. Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)
5. Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI)
6. *Bike to Work* Indonesia
7. Forum CSR DKI Jakarta
8. Gerakan Ciliwung Bersih (GCB)
9. Ikatan Arsitek Indonesia (IAI)
10. Ikatan Arsitek Lansekap Indonesia (IALI)
11. Indonesia Diet Kantong Plastik (IDKP)
12. Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK)
13. Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) DKI Jakarta
14. Koalisi Pejalan Kaki Indonesia (KPKI)
15. Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI)
16. Sepeda Ontel DKI Jakarta

H. Komunitas Difabel

1. Gerakan Peduli Disabilitas & Lepra Indonesia (GPDLI)
2. Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (Gerkatun)
3. Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI)
4. Sasana Inklusi & Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB)

I. Komunitas Warga Senior (Lansia)

1. Asosiasi Senior Living Indonesia
2. *Senior Club Indonesia*

J. Komunitas Perempuan

1. *House of Perempuan* (HOPE)
2. Institut KAPAL Perempuan
3. Koalisi Perempuan Indonesia (KPI)
4. PKK Provinsi DKI Jakarta
5. Srikandi Bumi

K. Komunitas Anak dan Pemuda

1. Gerakan Pramuka DKI Jakarta
2. KOPHI (Koalisi Pemuda Hijau Indonesia)
3. *Earth Hour* Jakarta
4. *Climate Rangers* Jakarta
5. i-Care

6. Golden Gropesh (Gerakan Orang Muda Peduli Sampah)
7. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

L. Kelompok Keagamaan

1. Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam (LPLHSDA) MUI Provinsi DKI Jakarta
2. Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam (LPLHSDA) MUI Pusat
3. Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (MATAKIN) DKI Jakarta
4. Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi DKI Jakarta
5. Pemerhati Peduli Lingkungan Hidup (Pepulih) Keuskupan Agung Jakarta
6. Persekutuan Gereja - Gereja di Indonesia (PGI)
7. Perwakilan Umat Buddha Indonesia (WALUBI) Provinsi DKI Jakarta

M. LSM/ CSO/ Organisasi Internasional

1. Aksi! for gender, social and ecological justice
2. C40
3. *Divers Clean Action*
4. *Green Building Council Indonesia* (GBCI)
5. Hutan Itu Indonesia
6. *Indonesia Solid Waste Association* (InSWA)
7. *Indonesian Institute for Energy Economics* (IIEE)
8. *Institute for Essential Services Reform* (IESR)
9. *Institute for Transportation and Development Policy* (ITDP)
10. KARINA - Caritas Indonesia
11. Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) DKI Jakarta
12. Koaksi Indonesia
13. Komite Penghapusan Bensin Bertimbang (KPBB)
14. *RUJAK Center for Urban Studies*
15. Sekretariat Jakarta Berketahanan
16. Solidaritas Perempuan
17. UCLG - Asia Pasific
18. *Urban and Regional Development Institute* (URDI)
19. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) DKI Jakarta
20. *World Research Institute* (WRI) Indonesia
21. *World Wild Fund for Nature* (WWF) Indonesia

N. Perguruan Tinggi dan Akademisi

1. Universitas Indonesia – *Research Center for Climate Change*
2. Institute Pertanian Bogor – *Centre for Climate Risk and Opportunity Management (CCROM)*
3. i3URI (*Indonesia International Institute for Urban Resilience and Infrastructure*)
4. Institut Teknologi Bandung

O. BUMN dan BUMD

1. PD. Perusahaan Air Limbah (PAL) Jaya
2. PT. AETRA
3. PT. Jakarta Propertindo
4. PT. Kereta Api Indonesia (KAI) Persero
5. PT. Kereta Commuter Indonesia (KCI)
6. PT. Lintas Rel Terpadu (LRT) Jakarta
7. PT. Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta
8. PT. PAM Lyonnaise Jaya (PALYJA)
9. PT. Perusahaan Air Minum (PAM) Jaya
10. PT. Transportasi Jakarta
11. PT. Wijaya Karya (WIKA) Industri Energi

P. Bisnis dan Industri

1. Kamar Dagang dan Industri (KADIN) DKI Jakarta
2. PT. Akuo Energy Indonesia
3. PT. Allianz Life Indonesia
4. PT. ANTAM
5. PT. Bina Lintas Usaha Ekonomi (BLUE)
6. PT. Gerbang Multindo Nusantara (GMN)
7. PT. GOJEK Indonesia
8. PT. GOWES
9. PT. GRAB Indonesia
10. PT. High Volt Technology
11. PT. HSBC
12. PT. Integrasi Transit Jakarta (ITJ)
13. PT. Kalbe Farma Tbk
14. PT. King Azis Kontruksi Indonesia

15. PT. Kompas Gramedia (KG)
16. PT. Monica Hijau Lestari Sentosa (*The Body Shop Indonesia*)
17. PT. Nodeflux Teknologi Indonesia
18. PT. Optima Integra Tehnika
19. PT. Pembangunan Jawa Bali (PJB) u.p. Muara Karang
20. PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero
21. PT. SPORA TEHNIKA Indonesia
22. PT. Starvo Global Energi
23. PT. Transit X
24. PT. Wasteforchange Alam Indonesia (Waste4Change)



Sumber: ICLEI Indonesia



Sumber: ICLEI Indonesia



Sumber: ICLEI Indonesia



Sumber: ICLEI Indonesia

ICLEI - Local Governments for Sustainability

ICLEI-Local Governments for Sustainability merupakan jaringan global dengan anggota lebih dari 2.500 kota & sub-nasional lainnya, dengan komitmen membangun masa depan yang berkelanjutan. Merupakan perwakilan resmi untuk Pemerintah Lokal & Otoritas Munisipal (LGMA) di COP/ UNFCCC. Aktif di lebih dari 125 negara, yang berfungsi untuk mendorong terjadinya kebijakan keberlanjutan dan aksi lokal dalam lingkup agenda pembangunan rendah emisi, berbasis alam, setara, berketahanan, dan sirkular ekonomi. Anggota dan tim ahli bekerja secara bersama-sama melalui cara pertukaran, kemitraan dan pengembangan kapasitas untuk menciptakan perubahan sistemik bagi kota secara berkelanjutan.

Contact info

ICLEI - Local Governments for Sustainability
Southeast Asia Secretariat
Units 3-4, Manila Observatory
Ateneo de Manila University
Loyola Hts., Quezon City 1108
Philippines
Email: iclei-sea@iclei.org
Phone: (+632) 426 0851

Yayasan ICLEI – Local Governments for Sustainability Indonesia
Jl. Karabela Selatan no. 46, Kel. Karet,
Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan - 12920
Email: iclei-indonesia@iclei.org
Phone: (+62) 21 2598-1322

www.iclei.org

www.icleiseas.org

www.facebook.com/ICLEISEAS

www.twitter.com/icleiseas

Program Ambitious City Promises (ACP)

Program ACP bertujuan untuk mendukung terciptanya “Ikhtiar/Janji Kota” dalam berkontribusi pada target mitigasi Gas Rumah Kaca (GRK) nasional melalui rencana dan kegiatan mitigasi yang ambisius di kota-kota besar di Asia Tenggara yaitu Indonesia, Filipina dan Vietnam. Untuk mencapai hal tersebut diselenggarakan serangkaian kegiatan guna membangun komitmen reduksi GRK yang kuat, menyusun rencana aksi iklim lokal yang diarahkan kepada target konkrit, meningkatkan pelibatan multi-pemangku kepentingan, dan terwujudnya strategi pencapaian penurunan emisi GRK yang padu dan terintegrasi.

Dalam melaksanakan kegiatan ini, ICLEI didukung oleh *German Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety (BMU)*. Sedangkan dalam implemenasinya bekerja sama dengan Pemerintah *Metropolitan Seoul (SMG)* yang telah sukses menerapkan konsep *Promise of Seoul* secara komprehensif dan melibatkan warganya. Di Indonesia, proyek ini diimplementasikan di DKI Jakarta sebagai kota model, serta Kota Tangerang, dan Kota Bekasi sebagai kota satelit.

**AMBITIOUS
CITY PROMISES**
Engaging citizens. Driving climate action.

Supported by:
 Federal Ministry
for the Environment, Nature Conservation
and Nuclear Safety
Based on the decision of the German Bundestag


Local Governments
for Sustainability



 **Jakarta**
a city of collaboration